

SKRIPSI

POLITIK PARIWISATA DITINGKAT LOKAL

**(Studi Pengembangan Desa Wisata Nyatnyono Ungaran Barat Kabupaten
Semarang)**

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik



Oleh:

Muhammad Irvan Nurcahyo

1806016048

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

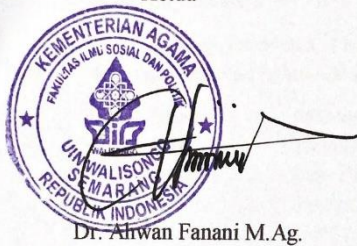
2022

SKRIPSI
POLITIK PARIWISATA DITINGKAT LOKAL (Studi Pengembangan Desa
Wisata Nyatnyono Ungaran Barat Kabupaten Semarang)

Disusun Oleh:
Muhammad Irvan Nurcahyo
1806016048

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 22 Desember
2022 dan dinyatakan lulus.

Ketua



Dr. Ahwan Fanani M.Ag.

Anggota Dewan Penguji

Dr. Ahwan Fanani, M.Ag

Sekretaris

Muhammad Mahsun, M.A

Penguji I

Dr. Nur Syamsudin, M.Ag

Penguji II

Tika Ifrida Takayasa, M.A

Pembimbing

Muhammad Mahsun, M.A

NOTA PEMBIMBING

Lampiran: -

Hal: Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth Dekan;

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang

Di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa;

Nama : Muhammad Irvan Nurcahyo

NIM : 1806016048

Jurusan : Ilmu Politik

Judul Skripsi : Politik Parawisata Ditingkat Lokal (Studi Pengembangan Desa Wisata Nyatnyono Ungarat Barat Kabupaten Semarang)


Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera dapat diujikan. Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 4 Desember 2022

Pembimbing

Bidang Substansi Materi dan Bidang Substansi Penulisan



Muhammad Mahsun, M.A

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“POLITIK PARIWISATA DITINGKAT LOKAL (Studi Pengembangan Desa Nyatnyono Ungaran Barat Kabupaten Semarang.** Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri tauladan bagi umat muslim. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan peneliti. Namun tetap mempersembahkan skripsi ini sebaik-baiknya agar bermanfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, peneliti akan menerima saran dan kritik konstruktif dalam perbaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini peneliti banyak mendapat bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Pada kesempatan ini dengan ketulusan hati yang paling dalam, peneliti mengucapkan terimakasih yang begitu besar kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Wahyu Setio Pribadi, Drs dan Ibu Ade Kurniawati, Dra serta adik saya Najwa Aulia Larasati yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat serta kasih sayang yang tiada hentinya, serta menjadi alasan peneliti untuk selalu semangat, optimis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang yang telah mendukung peneliti dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini.
3. Dr. Hj. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) yang telah mendukung peneliti dalam melaksanakan penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas bimbingannya kepada peneliti dalam penyusunan proposal hingga penyusunan skripsi ini selesai.

4. Muhammad Mahsun, M.A, Selaku Dosen Pembimbing utama yang telah membantu, memberikan nasehat, arahan dan juga saran atas pengerjaan skripsi ini. Terima kasih telah membimbing dengan sabar sehingga peneliti mampu untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Para dosen dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang, yang telah berbagi ilmu dan mengajarkan peneliti tentang berbagai pengetahuan yang dapat membantu peneliti dapat menyelesaikan Program Studi Sarjana Ilmu Politik.
6. Kemudian tidak lupa saya berterima kasih kepada teman-teman saya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya yang telah memberikan support baik di lingkungan sekitar saya, teman SD hingga teman bangku kuliah serta teman dari kecil.

Peneliti sangat menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu peneliti berharap dengan adanya kritik dan saran dari pembaca yang membangun, sehingga dapat menjadi referensi pada kesempatan lain dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 14 Desember 2022



Muhammad Irvan Nurcahyo

PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya ini adalah hasil kerja saya sendiri dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya, kecuali pengetahuan dan informasi yang diambil dari penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan dicantumkan sebagai sumber referensi yang menjadi bahan rujukan.

Demikian deklarasi ini dibuat oleh peneliti dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 22 Desember 2022



Muhammad Irvan Nurcahyo

1806016038

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap segala syukur Alhamdulillahirabbil'alamin, saya persembahkan hasil karya ini:

Untuk orang tua tercinta dan tersayang Papa Wahyu Setio Pribadi dan Mama Ade Kurniawati sebagai orang tua yang telah melahirkan, membesarkan dan mendidik saya dengan doa, ketulusan dan dukungan yang tak pernah putus. Apa yang saya dapatkan hari ini, belum mampu membayar semua kebaikan, keringat, dan juga air mata keduanya. Terima kasih atas segala dukungan, baik dalam bentuk materi maupun moril. Hasil karya ini saya persembahkan untuk kalian, sebagai wujud rasa terima kasih atas pengorbanan dan jerih payah kalian, sehingga saya dapat menyelesaikan studi saya.

Untuk Almamater tercinta Prodi Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, semoga semakin banyak mencetak lulusan-lulusan yang berkualitas.

MOTTO

“Pada akhirnya takdir Allah selalu baik walau terkadang perlu air mata untuk menerimanya”

(Umar Bin Khattab)

ABSTRAK

Parawisata memiliki peran yang cukup strategis karena memiliki pengaruh terhadap masyarakat baik dari tingkat local, regional, serta nasional. Karena parawisata sendiri memiliki hubungan antara social, budaya, ekonomi dan politik. Karena saat ini control pengembangan desa wisata tidak hanya dikendalikan oleh negara atau pemerintah daerah namun bisa di control langsung oleh Desa yang menetap pada wilayah tersebut. Seperti Desa Nyatnyono yang memiliki berbagai macam potensi wisata yang unik seperti wisata alam yang khas dan wisata religi yang kuat, namun dari keunikan desa wisata tersebut masyarakat desa Nyatnyono tidak bisa menjual potensi dari desa wisata tersebut. Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah melihat, studi pengembangan desa dalam perspektif politik parawisata. Dengan fokus kajian, landasan pengembangan desa wisata Nyatnyono, pengelolaan desa Nyatnyono, serta siapa aktor dominan dan strategis dalam potensi desa nyatnyono.

Dalam penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna mendapatkan informasi secara mendalam dan komprehensif dari pengembangan desa wisata Nyatnyono. Pada penelitian ini menggunakan teori yakni, konsep Desa Wisata dengan penekanan teori adalah Colaborative Governance. Penggunaan metode dan teori yang dipilih penulis untuk menganalisis hasil temuan secara mendalam dan komprehensif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Nyatnyono dalam pengelolaan Desa Wisata dinilai sudah terlaksana secara mandiri dalam pengamplifikasiannya namun, peneliti masih menemukan sedikit uraian masalah seperti koflik internal antara perangkat desa dengan pengurus wisata dimana tidak adanya kesinambungan dalam pengembangan desa wisata Nyatnyono. Sehingga dari faktor tersebut yang menyebabkan lambatnya peningkatan desa wisata Nyatnyono sebagai desa wisata religi, yang mempengaruhi aspek ekonomi, social dan politik desa.

Kata Kunci: Desa Wisata, Colaborative Governance

ABSTRACT

Tourism has a strategic role because it has an influence on society at the local, regional, and national levels. Because tourism itself has a social, cultural, economic, and political context. Because tourism village development is currently controlled not only by the state or regional government, but can also be controlled directly by the villages that live in the area, like Nyatnyono Village, which has a variety of unique tourism potentials such as unique natural tourism and strong religious tourism, but because of the uniqueness of this tourist village, the Nyatnyono village community cannot sell the potential of this tourist village. The focus of the research in this thesis is to look at village development studies from a tourism-political perspective. With the focus of the study, the basis for the development of the Nyatnyono tourism village, the management of the Nyatnyono village, and who are the dominant and strategic actors in the potential of the Nyatnyono village

This research was written using qualitative research methods with a case study approach in order to obtain in-depth and comprehensive information about the development of the Nyatnyono tourism village. In this study, two theories were used: Tourism Village concept with an emphasis on theory Collaborative Governance. The use of methods and theories chosen by the author to analyze the findings in depth and comprehensively.

The results of this study indicate that Nyatnyono Village's management of the tourism village is considered to have been carried out independently in its application; however, researchers still find a few descriptions of the problem, such as internal conflict between village officials and tourism administrators where there is no continuity in the development of the Nyatnyono tourism village. These factors have caused the slow progress of the Nyatnyono tourism village as a religious tourism village, which affects the economic, social, and political aspects of the village.

Keywords: Tourism Village, Collaborative Governance

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	2
KATA PENGANTAR	3
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	6
PERSEMBAHAN	7
MOTTO	7
ABSTRAK	8
ABSTRACT.....	9
DAFTAR ISI.....	10
BAB I.....	13
PENDAHULUAN	14
A. LATAR BELAKANG	14
B. RUMUSAN MASALAH.....	18
C. TUJUAN PENELITIAN.....	18
D. MANFAAT PENELITIAN	18
E. KAJIAN PUSTAKA TERDAHULU	19
1. Pembangunan dan Pengembangan desa wisata dalam prespektif politik	19
2. Relasi Elit dalam Politik Pariwisata.....	22
F. METODE PENELITIAN	24
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	24
2. Sumber dan Jenis Data	24
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Teknik Analisis Data.....	26
BAB II.....	28
PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN COLOBORATIVE GOVERNANCE	28
A. Pengembangan Desa Wisata.....	28
1. Konsep Desa Wisata	28
2. Pengembangan Desa Wisata	31

B. Colaborative Governance	34
1. Governance	34
2. Collaborative Governance.....	36
3. Pendekatan Collaborative Governance	38
BAB III	43
GAMBARAN UMUM PROFIL DESA SERTA PEMERITAHAN DESA NYATNYONO KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG	43
A. Profil Desa Nyatnyono	43
a. Gambaran Umum Desa Nyatnyono.....	43
b. Kondisi Demografis Desa Nyatnyono.....	44
c. Kondisi Sosial dan Politik	50
d. Kondisi Topografis Desa Nyatnyono	51
BAB IV	52
STRATEGI KOLOBOLARSI PEMERINTAH DESA NYATNYONO DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA	58
A. Kebijakan Pengembangan Desa Nyatnyono.....	58
B. Strategi Pengembangan Wisata	61
C. Pelaksana Pengembangan Desa.....	61
BAB V.....	70
TOKOH YANG MEMPUNYAI PERAN PENTING DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA DESA NYATNYONO	70
A. Peran Pemerintah Desa Nyatnyono	70
1) Sistem dan Kepengurusan Wisata.....	70
a. Peran Bumdes Nyatnyono	71
b. Peran Pokdarwis	73
c. Peran Karangtaruna	72
d. Komunikasi dan Keterlibatan Pihak Internal Desa Nyatnyono.....	73
BAB VI	76
PENUTUP.....	76
A. KESIMPULAN	76

B. SARAN	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN.....	80
a. Gambar Wawancara Bersama Kepala Desa Nyatnyono.....	80
b. Gambar Wawancara bersama Ketua Pokdarwis Desa Nyatnyono	81
c. Gambar Wawancara bersama masyarakat setempat Desa Nyatnyono	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance	39
Gambar 3. 1 Peta Desa Nyatnyono	44
Gambar 3. 2 Pintu Masuk Makam Hasan Munadi dan Hasan Dipuro.....	53
Gambar 3. 3 Makam Hasan Munadi	54
Gambar 3. 4 Makam Hasan Dipuro	54
Gambar 3. 5 Masjid Sabussalam.....	55
Gambar 3. 6 Sendang Kalimah Thayyibah	57
Gambar 4. 1 Paguyuban Ojek Wisata Nyatnyono	59
Gambar 4. 2 Tabel RKPDes 2021	60
Gambar 4. 3 Gambar Gerbang Utama Desa Nyatnyono.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Daftar Jenis Kelamin.....	45
Tabel 3. 2 Data Penganut Agama.....	46
Tabel 3. 3 Data Pendidikan Warga Nyatnyono.....	47
Tabel 3. 4 Data Sarana dan Prasarana Warga Nyatnyono	49
Tabel 3. 5 Data Luas Topografi Warga Desa Nyatnyono	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

sektor pariwisata tentu dapat dilihat dari berbagai aspek baik itu dari prespektif sosial, ekonomi, politik maupun budaya. Hal ini tidak terlepas dari pentingnya sektor pariwisata itu sendiri. Seperti yang diketahui bahwa sektor pariwisata merupakan hal yang cukup berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi suatu wilayah baik itu di kawasan lokal, regional maupun nasional. Mustapa (2022) bahkan berargumen bahwa peningkatan perekonomian suatu daerah karena adanya potensi pariwisata secara tidak langsung juga akan berpengaruh juga pada citra positif suatu wilayah tersebut.

Lebih lanjut, bagi negara yang memberikan jaminan keberlangsungan sektor pariwisata dengan baik maka akan menghasilkan efek domino positif dan peluang strategis khususnya dalam hal ekonomi, sosial-politik dan budaya. Inilah yang mendasari Hyubers dan Bennet (dalam Mustapa,2022) berpendapat bahwa sektor pariwisata haruslah dikelola secara serius oleh berbagai pihak baik itu negara, masyarakat, dan juga stake holder terkait sehingga akan menghasilkan peningkatan daya saing suatu wilayah teradap wilayah lainya atau daya tarik suatu negara dengan negara lainya.

Perhatian khusus dalam sektor pembangunan potensi pariwisata belakangan ini tidak hanya mengenai potensi-potensi pariwisata berskala nasional saja akan tetapi juga mencakup potensi-potensi pariwisata hingga pada tingkat desa. Ini dibuktikan dengan munculnya desa-desa wisata di berbagai wilayah di Indonesia yang menjadi daya tarik baru dalam persaingan potensi pariwisata. Priasukmana dan Mulyadi (dalam Soenarjanto, 2022) memberikan definisi bahwa desa wisata merupakan

kawasan pedesaan dengan yang menawarkan kekhasan tertentu melalui ciri yang melekat sebagai representatif desa tersebut. Keaslian ini tergambar dari aspek sosial, budaya, adat istiadat, bangunan fisik dan struktur tata kelola desa yang khas sehingga dapat dijadikan sebagai sebuah potensi pariwisata untuk terus dikembangkan.

Kemunculan desa wisata di banyak daerah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pengimplementasian Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam undang-undang tersebut khususnya yang terdapat pada pasal dua menjadi dasar dimana model tata kelola desa yang mandiri dan otonom. Regulasi tata kelola pemerintahan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tersebut selain menegaskan bahwa kedudukan desa tidak lagi pada garis *vertical* (garis lurus) dengan pemerintah daerah dalam menjalankan sistem pemerintahan, namun pemerintah desa berdiri otonom dengan prinsip dan tetap berdasar pada gabungan *self-governing* serta *local-governing*. Ini menjadi bukti dengan adanya pengakuan dan akomodasi nilai-nilai dan potensi-potensi lokal. Sofyani (2018) berpendapat bahwa segala macam yang berkaitan dengan pemerintahan, mengatur masyarakat dan segala potensi yang dimiliki desanya diatur dan disesuaikan dengan prakarsa masyarakat desa itu sendiri. Ini tidak terlepas dari hak-hak tradisional desa yang diakui serta dihormati dalam lingkup pemerintahan negara Indonesia. Dengan demikian, adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 ini desa memiliki hak untuk mengatur segala potensi yang dimilikinya, termasuk juga salah satunya adalah potensi wisata.

Desa Nyantnyono merupakan salah satu desa di Kabupaten Semarang yang memiliki potensi pariwisata khususnya wisata religi. Berdasarkan dari Surat Keputusan Bupati Kabupaten Semarang Nomor 556/0389/2020, Desa Nyatnyono ditetapkan sebagai salah satu desa wisata dari 55 desa wisata yang ada di Kabupaten Semarang. Potensi wisata yang dimiliki desa Nyatnyono ini didasarkan pada adanya makam dari Waliyullah Hasan Munadi beserta putranya Waliyullah Hasan Dipuro yang

mana beliau berdua ini merupakan murid dari salah satu Walisongo yang terkemuka, yakni Sunan Ampel. Selain adanya makam Waliyullah tersebut, desa Nyatnyono juga memiliki potensi wisata lain seperti Sendang Kalimah Tayyibah dan juga adanya bangunan Masjid Subussalam peninggalan Waliyullah. Selain adanya atraksi pariwisata tersebut, Desa Nyatnyono juga memiliki hawa yang sejuk dan juga asri sehingga memanjakan para peziarah yang berkunjung ke desa tersebut (Pitaloka,2021).

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa berjalanya sektor wisata akan membawa dampak positif bagi sektor sosial ekonomi warga masyarakat di wilayah tersebut. Terlebih lagi dengan adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan keleluasaan pemerintah desa untuk mengatur segala potensi yang dimiliki pasti menjadi hal yang menarik untuk diteliti terutama desa yang memiliki potensi pariwisata seperti Desa Nyatnyono di Kabupaten Semarang ini. Tentu untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya upaya sinergi baik itu Masyarakat dan Pemerintah Desa, Pemerintah Daerah bahkan bisa juga melibatkan stakeholder terkait untuk mengembangkan potensi yang ada.

Dengan potensi yang dimilikinya, Desa Nyatnyono tentu memiliki nilai jual yang dapat dikembangkan guna membangun kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Dengan adanya Keputusan Bupati Semarang No.556/0389/2020 yang menetapkan Desa Nyatnyono menjadi salah satu desa wisata di kabupaten semarang, maka kajian lebih dalam mengenai desain/landasan pembangunan dan pengembangan Desa Nyatnyono menjadi desa wisata menjadi hal yang penting untuk diketahui. Ini dikarenakan berhasil atau tidaknya sebuah pengelolaan desa menjadi desa wisata tidak terlepas dari bagaimana masyarakat setempat mendesain wilayah mereka sebagai wilayah desa yang memiliki basis sebagai desa wisata.

Selain mengetahui mengenai bagaimana desain atau landasan pembangunan dan pengembangan Desa Nyatnyono menjadi desa wisata, tentu langkah selanjutnya yang berkaitan erat dengan hal tersebut adalah bagaimana pemerintah desa Nyatnyono melakukan pengelolaan terhadap segala macam potensi yang dimiliki oleh desa untuk menunjang desain pembangunan desa wisata di kawasan tersebut. Peran penting yang tercipta dari adanya sinergi antara pemerintah Desa Nyatnyono, masyarakat dan tentu stakeholder terkait sangat dibutuhkan untuk mengelola potensi pariwisata di kawasan desa Nyatnyono tersebut. Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa, masyarakat dan juga stakeholder terkait dalam pengelolaan potensi pariwisata yang dimiliki desa Nyatnyono maka secara otomatis kita akan mengetahui siapa saja aktor-aktor yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan desa Nyatnyono sebagai desa wisata di Kabupaten Semarang.

Kemudian, dalam skripsi kali ini penulis menggunakan teori konsep desa wisata dengan penekanan teori Collaborative Governance yang telah diutarakan oleh Ansell dan Gash (2008) dimana untuk merumuskan penyelesaian pembentukan penulisan serta sebagai acuan teori. Pengembangan teori tersebut tidak semata-mata sebagai teori saja. Melainkan sebagai patokan teori tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dituliskan.

Berdasarkan dari penjelasan yang telah diuraikan tersebut, pada akhirnya menjadi dasar penulis untuk mengangkat fokus kajian mengenai studi pengembangan desa wisata Nyatnyono ditinjau dari prespektif politik pariwisata. Dalam fokus kajian ini, penulis akan menekankan pada tiga hal utama yakni landasan pengembangan desa wisata Nyatnyono, Pengelolaan desa wisata Nyatnyono serta mengetahui siapa saja aktor-aktor yang terlibat serta memiliki peran yang dominan dan strategis dalam pengelolaan potensi pariwisata di desa Nyatnyono tersebut. Kajian mengenai hal ini penting untuk dilakukan sebab, berkembangnya suatu potensi pariwisata di suatu

wilayah atau dalam hal ini adalah Desa Nyatnyono tentu memerlukan sinergitas dari tiga aspek yakni pemerintah, masyarakat dan stakeholder terkait. Selain itu dengan melihat bagaimana desain yang menjadi landasan pembangunan desa Nyatnyono menjadi desa wisata juga menjadi dasar tata kelola desa tersebut kedepannya. Dengan potensi yang dimiliki dan didukung desain yang jelas dan tata kelola desa yang baik, maka bukan tidak mungkin Desa Nyatnyono bisa menjadi salah satu desa wisata yang maju kedepannya.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan permasalahan antara lain :

1. Bagaimana kolaborasi pengembangan Desa Nyatnyono sebagai desa wisata?
2. Siapa saja yang memiliki peran strategis dan dominan dalam pengelolaan desa wisata di Nyatnyono Kabupaten Semarang?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengelolaan desa wisata di Nyatnyono Kabupaten Semarang
2. Mengetahui Siapa saja yang memiliki peran strategis dan dominan dalam pengelolaan desa wisata di Nyatnyono Kabupaten Semarang

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Praktis

- a) Bagi institusi, dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan dalam kajian sistem tata kelola pemerintah desa. Hasil penelitian ini juga mampu bisa memberikan informasi yang akurat selain untuk hall tata kelola pemerintahan Desa Nyatnyono Secara keseluruhan, juga mengenai fokus khusus yakni pengelolaan potensi wisata religi yang dimiliki Desa Nyatnyono.

- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pengetahuan serta pemahaman yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan desa khususnya desa yang memiliki potensi pariwisata sesuai dengan apa yang diamanahkan dalam UU No. 6 Tahun 2014
- c) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan serta wawasan menghadapi realitas yang terjadi saat ini yakni bagaimana tata kelola pemerintah desa

2. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi ilmiah menyangkut kajian mengenai tata kelola desa bukan hanya dalam segi pemerintahannya saja akan tetapi juga potensi yang dimiliki dalam prespektif politik pariwisata.
- b) Dengan adanya penelitian ini diharapkan menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan tema serupa.

E. KAJIAN PUSTAKA TERDAHULU

Penelitian mengenai upaya pengembangan desa wisata Nyatnyono di Kabupaten Semarang dalam prespektif politik pariwisata belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi penelitian-penelitian dengan tema terkait mengenai politik pengembangan desa wisata telah dilakukan beberapa pihak. Dalam tinjauan pustaka ini akan dibagi menjadi dua bagian yakni fokus mengenai upaya pembangunan dan pengembangan desa wisata dalam prespektif politik dan juga mengenai relasi elit yang berperan dalam pengembangan desa wisata tersebut.

1. Pembangunan dan Pengembangan desa wisata dalam prespektif politik

Pertama, Kajian mengenai tema ini telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya antara lain Trius (2021), Mustapa (2022), Prasiasa (2022), Soenarjanto, dkk (2022) serta penelitian pendukung dengan tema terkait seperti yang dilakukan oleh Pitaloka (2021) dan juga Sartika

(2018). Penelitian yang dilakukan Trius (2021) berfokus pada pembangunan desa wisata yang berlokasi di Ulak Pandan Merapi Barat Kabupaten Lahat Sumatera selatan. Dalam penelitian tersebut diungkapkan bahwa pemerintah desa Ulak Pandan melakukan inovasi pembangunan desa melalui pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, lingkungan dan kelembagaan dalam hal ini pemerintah desanya sudah baik. Ditunjang juga dengan pembangunan fisik fasilitas desa yang baik pula. Pemerintah desa Ulak Pandan telah berjalan baik itu secara diskursus, Kekuasaan, dan pengetahuan telah memenuhi. Dalam penelitian ini juga diungkapkan bahwa terdapat aktor-aktor yang mempengaruhi baik itu berpengaruh positif ataupun negatif. Seperti sistem kekuasaan, ideologi dan intervensi asing. Ini juga dipengaruhi oleh beberapa motif seperti motif politik pembangunan, kekuasaan, identitas dan aktualisasi. Faktor penghambat yang diungkapkan dalam penelitian ini antara lain, masih adanya kepentingan-kepentingan kelompok serta sumber daya manusia yang berada di desa itu masih lemah terutama kenakalan remaja yang tidak sama sekali membantu upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah desa.

Kedua, Mustapa (2020) melakukan sedikit hal yang berbeda dari penelitian yang dilakukan Trius. Selain lingkup penelitian Mustapa ini lebih spesifik lokusnya, penelitian ini juga mengungkapkan temua bahwa adanya keikutsertaan publik, negara (pemerintah) dan juga stakeholder terkait serta ditunjang pula dengan pasar yang baik akan menguatkan dimensi politik pembanguna pariwisata khususnya dalam penelitian ini adalah situ bagendit. Dan berlaku sebaliknya apabila dalam proses tersebut masih dipenuhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Mustapa menekankan akan pentingnya kejelasan kepemilikan aset wisata karena penelitian in memandang situbagendit masih menimbulkan selisih paham antara kepemilikan pusat atau daerah sehingga bukan malah pembangunan yang berjalan akan tetapi lebih kental nuansa politik yang terjadi. Dalam

penelitian ini juga diungkapkan pentingnya semua pihak ikut serta dalam pembangunan situ bagendit sebagai pariwisata berkelanjutan.

Ketiga, Prasiasa (2022) dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa bagaimana pariwisata memiliki pengaruh mengubah struktur kekuasaan serta nilai-nilai dari suatu daerah tujuan wisata. Pengembangan pariwisata haruslah dikeluarkan dari konflik-konflik kepentingan dan ini haruslah menjadi fokus bagi tiga pemain kunci pengembangan pariwisata tersebut yakni pemerintah masyarakat dan juga pasar. Akan tetapi tantangan yang muncul dalam pengembangan pariwisata tersebut adalah kapitalisasi serta komodifikasi potensi-potensi pariwisata itu sendiri.

Keempat, Soenarjanto, dkk (2022) dalam penelitiannya dengan lokus Desa Wisata Gununganyar mendapatkan temuan bahwa telah terjadi kolaborasi dalam pengembangan potensi pariwisata tersebut yakni terjalinya kerjasama antara stakeholder terkait meskipun belum berhasilmaksimal. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi mengenai penekanan akan pentingnya mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi antara pihak-pihak terkait dalam pengembangan potensi pariwisata dan juga lebih mengedepankan kerjasama dalam optimalisasi pengembangan Desa Wisata Gununganyar.

Kelima, Sementara itu berbeda dari empat penelitian sebelumnya, Penelitian yang dilakukan oleh Sartika (2018) dan Pitaloka (2021) memang memiliki lokus yang sama yakni mengenai Desa Nyatnyono di Kabupaten Semarang. Akan tetapi dalam penelitian yang dilakukan oleh Sartika lebih terfokus pada melihat dinamika kebudayaan desa nyatnyono itu sendiri. Hal ini menunjang pemahaman bagi penelitian yang akan penulis lakukan mengenai prespektif budaya desa nyatnyono. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Pitaloka akan memberikan gambaran penguatan bahwa apabila potensi pariwisata yang dimiliki oleh Desa Nyatnyono ini

dimaksimalkan maka akan membawa dampak positif pada kondisi sosial ekonomi masyarakat di desa Nyatnyono tersebut.

2. Relasi Elit dalam Politik Pariwisata

Pertama, Penelitian mengenai fokus ini juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya seperti Prayogo (2019), Aprigiyana dkk (2021), dan Sakti (2021). Prayogo (2019) berfokus pada relasi antara pemerintah daerah dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dalam upaya pengembangan pariwisata di kawasan bromo. Dalam penelitian ini Prayogo menyimpulkan bahwa dibutuhkan sinergi antara banyak pihak dalam upaya pembangunan serta pengelolaan sektor pariwisata di kawasan Bromo sesuai dengan bidangnya. Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru merupakan pengelola resmi yang otoritatif mengelola tempat ini, namun masih memerlukan bantuan dari pihak-pihak lain dalam setiap kebijakan yang diambil. Terutama dalam hal pengelolaan yang lebih jelas mengenai kawasan bromo ini apakah dijadikan sebagai ekowisata atau ranah wisata secara massal. Oleh karena itulah dalam pengelolaan ini diperlukan relasi politik antara stakeholder terkait.

Kedua, Aprigiyana, dkk (2021) dalam penelitiannya mengenai dominasi kelompok elite dalam pengembangan pariwisata di desa Tenganan Pegriingsingan mengungkapkan temuan bahwa dominasi elit disini adalah dominasi elite adat dengan kepentingannya adalah motif ekonomi. Masyarakat adat memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga kelestarian desa Tenganan menimbulkan Keterbatasan Ruang Gerak dalam mencari pekerjaan. Hal ini yang menjadikan para elite merencanakan pengembangan pariwisata agar kegiatan ekonomi dapat berlangsung tanpa meninggalkan desa. Elite disini memiliki kekuasaan untuk mendorong terwujudnya kebijakan pengembangan potensi Desa Tenganan Pegriingsingan menjadi potensi wisata karena para elite inilah yang memiliki segala macam akses yang menjadikan mereka mampu untuk membuat suatu regulasi agar

kawasan ini mampu dikembangkan. Sementara itu sebaliknya kelompok non elite tidak dapat berbuat banyak.

Ketiga, Sakti (2021) penelitian ini berangkat dari kerangka berpikir bahwa pariwisata sebagai sebuah industri yang berpengaruh pada proses perekonomian global. Namun peneliti ini mengambil prespektif yang berbeda, yakni bagaimana elite khususnya di tingkat desa memilii peran penting dalam ikut serta mempromosikan potensi-potensi yang dimiliki desa. Hal ini dimulai dari proses edukasi kepada warga masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana logika yang digunakan oleh para elite terutama dalam praktik nyata yang mereka lakukan dalam pembangunan Desa Wisata Pujon Kidul.

Keempat, Rosidah (2019) penelitian ini mengangkat mengenai adanya sebuah potensi wisata yang berada di Desa Pasirtamiang terlebih khusus kepada sektor wanawisata yang hingga saat ini belum terkelola secara formal karena belum adanya stuktur ikatan pengelolaan yang jelas. Selain itu, dari beberapa stakeholder dengan perangkat pemerintah yang terkait belum adanya kesepakatan bersama dalam proses pengembangan wanawisata yang berada dalam desa tersebut.

Kelima, Nyoman (2012) dalam penelitian bermula dari adanya relasi kekuasaan dalam pengelolaan industri di kawasan Bali terlihat dengan munculnya pergerakan, manuver, serta taktik untuk pengambilan keputusan dalam menyusun bentuk pengembangan industri pariwisata. Adapun berkembangannya relasi kekuasaan yang sedang dijalankan, pemerintah Bali juga menciptakan sebuah terobosan baru untuk menunjang potensi terutama sektor pariwisata

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Menurut John W. Creswell (2016:4-5), penelitian kualitatif merupakan metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami sejumlah individu maupun kelompok yang berasal dari masalah sosial atau masalah kemanusiaan dengan melibatkan upaya-upaya penting. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus menjadi sebuah kegiatan ilmiah cara intensif, rinci, dan lainnya untuk memperoleh pengetahuan mengenai peristiwa yang akan diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif yang nantinya di paparkan keadaan yang terjadi dalam penelitian secara luas (Ruseffendi, 2010: 15)

2. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer sebagai data utama diperoleh dari sumber data pertama sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak-pihak lain sekaligus menjadi dukungan dari data primer. Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari objek utama penelitian yakni Rezim Tata Kelola yang kemudian diperoleh juga dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yakni pihak masyarakat dengan perangkat pemerintah desa sebagai responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dengan cara mengambil dari berbagai sumber artikel, buku-buku, jurnal penelitian dan berbagai sumber dari berbagai media baik media cetak ataupun media elektronik yang berkaitan dengan Rezim Tata Kelola pada Desa Nyatnyono.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian, seorang peneliti membutuhkan teknik pengumpulan data baik sebelum maupun pada saat melaksanakan

pengumpulan data. Adapun prosedur pendukung dalam melakukan penelitian kualitatif, penulis melakukan pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumen/literatur dan triangulasi. Adapun teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi merupakan sebuah pengamatan yang dilakukan dengan sistematis yang memiliki tujuan untuk memperoleh data. Hal ini dapat pula dikatakan sebagai dasar peneliti guna memperoleh fakta-fakta dan temuan dari objek penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik observasi dimana penulis akan mengamati serta menganalisa bagaimana yang terjadi secara langsung di lapangan yang mengangkat dari judul *Rezim Tata Kelola Desa* berlokasi di Desa Nyatnyono Kab.Semarang. Hal tersebut sangatlah penting ditinjau dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dengan mengambil subjek perangkat desa dengan masyarakat desa.

b) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak memiliki maksud tertentu guna mencari sebuah sumber data ataupun informasi dari narasumber kepada pewawancara yang dilakukan dengan tanya jawab antara keduanya dengan menggunakan prosedur wawancara yang telah disediakan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai cara peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung sesuai subjek yang dituju dalam menjalankan proses penelitian. Subjek wawancara yang akan dituju adalah Kepala Desa Nyatnyono, Perangkat Desa Nyatnyono, serta Masyarakat Desa Nyatnyono.

c) Studi Dokumen dan Literatur

Studi dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan sejumlah dokumen pendukung penelitian seperti gambar, foto, peta, data statistik, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan sebagai pembantu penulis dalam melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen terkait dalam penelitian yang nantinya akan dituangkan pula sebagai analisis pendukung terhadap objek kajian penelitian. Teknik selanjutnya adalah dengan menggunakan studi literatur dengan mengumpulkan beberapa data yang berasal dari sejumlah buku, jurnal, surat kabar, literasi internet dan lain sebagainya yang berkenaan dengan topik penelitian. Studi literatur dilakukan dengan tujuan menganalisis berbagai teori terkait dengan fokus penelitian yang sedang dilakukan sebagai rujukan dalam pembuatan analisis hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan oleh peneliti setelah melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumen menjadi lebih bermakna apabila dianalisis secara mendalam. Setelah semua data terkumpul maka dapat dilakukan analisis data dengan penilaian secara mendalam terhadap data yang diperoleh dari sumber atau partisipan untuk kemudian ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dibuat. Teknik analisa data dilakukan dengan proses mulai dari penyusunan, pengelompokkan serta menyangkut antara isi data dengan teori-teori yang digunakan dengan tujuan mendapatkan jawaban dari analisa tersebut.

Penggunaan teknik analisa data yang sesuai dengan judul Rezim Tata Kelola Desa memakai teknik analisis data yang dirumuskan oleh Bogdan dan Biklen dalam Lexy Moleong (2016:248) menyatakan bahwa analisis data dilakukan dalam kegiatan yang berkaitan dengan data, megorganisasikan data, memilah-milih data menjadi satuan data yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan memutuskan

data apa saja yang perlu disajikan. Mengapa demikian, karena penggunaan teknik data tersebut sangat relevan dengan apa yang ada pada kasus permasalahan yang sedang ditulis oleh penulis dalam penelitian kali ini.

BAB II

PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN COLLABORATIVE GOVERNANCE

Bab ini lebih berfokus pada teori yang akan digunakan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah, teori yang akan digunakan adalah Konseptual Desa Wisata dengan lebih menekankan kepada Collaborative Governance.

A. Pengembangan Desa Wisata

a. Konsep Desa Wisata

Wilayah tepencil dalam satuan wilayah sekarang tidak lagi disebut desa semata. Namun apabila desa tersebut memiliki potensi nilai jual dari hasil kekayaan sumber daya alam yang cukup indah yang menjadikan desa tersebut dikategorikan Desa Wisata. Proses mengembangkan desa wisata, masyarakat bersama pemerintah sudah seharusnya mengembangkan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Yakni, unsur perbedaan yang terdapat di desa namun tetap mencerminkan jati diri berbangsa. Beragam tradisi adat istiadat kebudayaan, tradisi masyarakat, keindahan alam, kerajinan tangan dan lain yang menjadi identitas suatu wilayah sebagai bentuk kekayaan yang dimiliki Indonesia. Hal ini yang menjadi satu fokus landasan guna mengembangkan desa menjadi destinasi atau desa wisata tanpa adanya persaingan merebut pengunjung atau wisatawan.

Wisata untuk sekarang tidak hanya sebagai destinasi rekreasi hiburan semata yang dipilih oleh pendatang namun bisa dijadikan sebagai media pendidikan dan tempat belajar. Desa wisata dipilih kebanyakan masyarakat karena memberikan keunikan tersendiri yang tidak dapat diberikan oleh wisata modern. Hal ini yang membentuk dan melahirkan konsep Desa Wisata muncul. Dimana setiap desa wisata memiliki keunikan dan karifan lokal tersendiri dimana maksud dari kearifan dan unik ini memiliki makna sebagai keberagaman baik itu pengetahuan maupun kebiasaan masyarakat seperti budaya tertentu yang khas yang sudah menjadi tradisi dan

kebiasaan yang cukup lama secara turun temurun sebagai bentuk output dari bentuk proses hubungan penduduk dengan lingkungannya (Ari, 2016).

Tingginya minat pengunjung untuk mendatangi tempat wisata yang menawarkan alam pedesaan merupakan peluang pasar yang cukup menjanjikan untuk menciptakan desa tradisional menjadi wilayah yang disebut Desa Wisata. Peluang ini seharusnya bisa dimaksimalkan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk lebih meningkatkan potensi alam desa yang dapat dijadikan nilai jual sebagai pendapatan masyarakat sebagai pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Komponen desa wisata harus mempunyai keunikan dan ciri khas sendiri seperti letak yang berdekatan dengan alam, dimana berkaitan dengan kelompok atau masyarakat yang dapat menarik minat pengunjung. Selain itu memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi sarana dan prasarana. Karena desa wisata mempunyai daya tarik tinggi terhadap keunikan yang dimiliki, terdapat tiga daya tarik yang dimaksud yaitu: Pertama, Cultural attraction, berkaitan dengan budaya berdasarkan kegiatan manusia. Contoh: sejarah, arkeologi, religi dan kehidupan tradisional masyarakat. Kedua, Natural attraction. Mengacu pada kondisi lingkungan secara alami yang sudah ada. Contoh: pemandangan, iklim, flora, fauna dan lainnya. Ketiga, Special types of attraction. Atraksi buatan seperti museum, mall, pertunjukan seni, theme park dan lainnya (Widyastuti, 2018).

Untuk menjaga kualitas dan kuantitas asli dari Desa Wisata itu sendiri masyarakat bisa melihat dari landasan yang telah dibentuk dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD RI) 1945 Pasal 33 Ayat 3 berbunyi 'bumi, air, kekayaan alam di dalamnya, dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.' Amanat ini bisa menjadi acuan yang baik guna menciptakan dan mengembangkan desa demi kemakmuran dan kemajuan bersama. Sehingga dapat diluruskan dari

penggunaan kata “dikuasai” pada UUD RI 1945 dapat diartikan sebagai pengembangan, pengaturan, pengawasan dan pembinaan. Banyak peran yang memutuskan desa wisata itu sendiri. Mulai dari tingkat RT hingga kepala desa. Namun perlu menerima masukan dan arahan dari camat dan walikota/bupati setempat. Agar terciptanya aturan positive sehingga dikemudian hari tidak lagi melahirkan kesalahpahaman baik dengan masyarakat maupun pemerintah daerah (Syah, 2017).

Selain dari makna UUD 1945, Desa Wisata sendiri dikuatkan dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri Kepariwisata. Dimana ditegaskan bahwa Desa wisata tercipta dari hasil integrasi, atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang diberikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tradisi dan tata kelola yang berlaku. Semua itu terintegrasikan dalam satu struktur tatanan kehidupan sosial masyarakat yang juga di dalamnya melekat tata cara dan tradisi serta adat istiadat yang ada. Desa wisata juga dimaknai sebagai *rural tourism* dimana pariwisata ini bersifat menyeluruh baik itu pengalaman pedesaan, atraksi dan potensi wisata yang di sajikan dan segala macam unsur penunjang lainnya yang menjadi daya tarik bagi para wisatawan. Nuryanti (dalam Antara,2015).

Dilihat dalam prespektif kehidupan sosial masyarakat, desa wisata dimaknai juga sebagai sebuah bentuk dengan fokus daya tarik wisata yakni sistem kehidupan dengan ciri khas tertentu dari masyarakat di wilayah desa tersebut. Sehingga hal ini yang menjadi pendorong para wisatawan untuk berkunjung ke desa tersebut. Dengan demikian desa wisata ini juga menjadi sebuah industri pariwisata yang mengintegrasikan akomodasi pariwisata selain atraksi pariwisata yang dimilikinya. Hal ini meperkuat apa yang dikemukakan oleh Nuryanti dan Wiendu (1993) yang berpendapat desa wisata merupakan satu kesatuan yang terintegrasi baik atraksi

pariwisata, akomodasi dan juga fasilitas pendukung lainnya yang tersaji dalam satu struktur kehidupan masyarakat desa tersebut.

Menurut Pariwisata Inti Rakyat atau yang disebut PIR, suatu wilayah desa dengan seluruh keaslian dan kemurnian yang khas baik dari ekonomi sosial, budaya dan ada istiadat arsitektur bangunan dan stuktur tata ruang desa yang khas, operasi perekonomian yang cukup menarik, serta memiliki potensi yang dapat dikembangkan, seperti akomodasi, atraksi, dan kebutuhan lainnya. Pengembangan pariwisata dilakukan guna target yang tercapai sesuai yang diharapkan dengan melihat segala sumber daya yang dimiliki. Tipe pengelolaan desa wisata dapat dibagi menjadi dua yakni tipe terbuka dan terstruktur. Dua tipe tersebut dibedakan pada lahan yang terbatas dan terpisah dari masyarakat setempat yang dipenuhi dengan pembangunan spesifik yang mana siap memberi pelayanan terbaik. Berbeda tipe terbuka dimana pedesaan yang berkembang menjadi struktur kehidupan baik pola, ruang dengan masyarakat sekitar sehingga manfaat dan dampak dapat diterima secara langsung. (Hadiwijoyo, 2012)

Dari penjelasan diatas desa wisata bisa dimaknai sebagai Suatu wilayah pedesaan yang menawarkan semua nuansa yang mencerminkan kemurnian dari pedesaan itu sendiri yang terdiri dari budaya, adat istiadat, sosial, arsitektur bangunan struktur tata kelola yang khas dari kehidupan ekonomi sosial atau kegiatan perekonomian yang menarik dan unik serta memiliki potensi yang dapat dikembangkan dari keparawisataanya baik dari akomodasi, atraksi, cinderamata, bahan pokok serta kebutuhan lainnya. Semua komponen tersebut merupakan bagian terciptanya Desa Wisata.

b. Pengembangan Desa Wisata

Untuk memaksimalkan desa wisata perlu peran antara pihak internal dan eksternal. Namun peran yang memenuhi itu semua tidak dapat terrealisasi dengan baik karena tidak memiliki rencana pengembangan yang baik secara matang. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan dimulai dari

pengembangan desa wisata yang baik untuk menghasilkan dan menciptakan keberhasilan dan kesuksesan desa wisata yang akan dibangun. Dasar pengembangan desa wisata adalah mengetahui tentang karakter dan kemampuan elemen dari desa seperti: sosial budaya, ekonomi, kondisi lingkungan, aspek historis, dan kemampuan serta pengetahuan lokal (Hilman, 2017). Kemudian, Menurut Priasukmana dan Mulyadin, Desa Wisata yaitu sebuah kawasan pedesaan yang secara keseluruhan memberikan pesona dan keaslian dari pedesaan itu sendiri baik dari sosial budaya, adat istiadat, tata ruang dan kegiatan ekonomi yang unik dan menarik untuk dikembangkan.

Pengembangan wisata menurut Pearce sebagai usaha dalam meningkatkan pelayanan dan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat. Diperlukannya pembangunan dan pengembangan dalam sektor pariwisata melalui peran aktif pemerintah menjadi instrument yang penting. Pengembangan pariwisata memberikan keuntungan bagi wisatawan ataupun bagi masyarakat sekitar. Dalam pariwisata tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan pada sektor ekonomi yang bisa meningkatkan keuntungan pada masyarakat dimana bersumber dari tempat wisata tersebut (Happy Marpaung, 2002). Pengembangan pariwisata yang minimal harus ada mencakup sebagai berikut:

- a. Akseibilitas, mencakup rute atau jalur transportasi menuju objek.
- b. Daya Tarik dan Objek, meliputi wisata alam, budaya maupun buatan.
- c. Amenitas, mencakup fasilitas penunjang seperti rumah makan, biro perjalanan, pusat informasi wisata, dan akomodasi
- d. Kelembagaan, yang terlibat adanya peran masing-masing pendukung dalam kegiatan pariwisata termasuk masyarakat sekitar
- e. Fasilitas Pendukung, mencakup rumah sakit, bank, dan sebagainya.

Pengembangan wisata merupakan sebuah pengembangan secara berkelanjutan yang di dalamnya terdapat keterkaitan antara pemimpin masyarakat, masyarakat setempat dan wisatawan yang menginginkan harapan yang lebih baik. Suatu tempat wisata harus berisikan tiga komponen tersebut untuk menjadi wisata yang baik. Menurut Suwantoro (1997:9) ada beberapa faktor penunjang pengembangan wisata, antara lain:

a. Daya Tarik dan Obyek

Mempunyai ciri khas yang menjadi pendorong wisatawan baik local maupun non-local untuk berkunjung ke suatu daerah. Daya tarik wisata mencakup Pertama, adanya sumber daya yang menarik. Kedua, Aksesibilitas yang tinggi. Ketiga, Spesifikasi bersifat langka. Keempat, adanya sarana dan prasarana. Kelima, daya tarik wisata seperti sungai, hutan, pegunungan, pantai dan lain-lain

b. Prasarana Wisata

Potensi yang berisi sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia sebagai penunjang dalam perjalanan wisatawan tujuan wisata seperti listrik, jalan, air, telekomunikasi, pengisi bahan bakar, jembatan dan sebagainya

c. Sarana Wisata

Kelengkapan tujuan wisata untuk kebutuhan wisatawan dalam perjalanan wisata. Sarana yang disediakan oleh tujuan wisata seperti alat transportasi, restoran, hotel, biro perjalanan, rumah makan dan sarana pendukung lainnya.

Dengan apa yang telah dijelaskan di atas, langkah selanjutnya yang juga penting untuk diperhatikan adalah mengenai perkembangan desa wisata. terdapat faktor penting yang harus dipenuhi sebagai dasar untuk mengembangkan desa wisata kedepannya yakni pentingnya menjaga keaslian desa tersebut. Keaslian desa dengan segala potensi pariwisata yang ada tentu harus terintegrasi menjadi komponen pariwisata yang ada. Seperti yang dikemukakan oleh Gumelar (2010) bahwa sejatinya tidak

semua kegiatan pariwisata di sebuah desa dapat menjadi dasar bahwa desa tersebut menjadi desa wisata. oleh karena itu dibutuhkan pembeda yang menjai hal penting bagi sebuah desa yang benar benar memiliki sifat sebagai desa wisata yaitu :

- a. Memiliki keunikan, yang menjadi keaslian atau ciri khas dari desa tersebut
- b. Posisinya dtunjang dengan potensi alam yang dapat dinikmati
- c. Memiliki struktur tata kelola kehidupan masyarakat yang asli serta bernilai tradisi khas yang menjadi daya tarik bagi pengunjung
- d. Dengan demikian maka desa tersebut juga akan memiliki peluang untuk berkembang menjadi lebih baik.

B. Collaborative Governance

1. Definisi Governance

Sebelum masuk pada pembahasan *collaborative governance*, perlu kiranya memahami apa itu *governance*. Pengertian dari *governance* perlu dibahas karena menjadi dasar penting tentang konsep *collaborative governance*.

Desa tradisional yang sekarang menjadi memiliki nilai jual dan dapat dijadikan aset yang perlu dijaga oleh pemerintah daerah. Hal tersebut bisa terjadi karena peran penting dari setiap aktor yang dimainkan atau terjadinya proses kolaborasi antar dua pihak baik dari lingkup kecil di dalam tubuh desa itu sendiri yang bekerjasama antara masyarakat dengan pemerintah desa. Karena untuk menyatukan ide dalam memaksimal kan potensi kekayaan desa perlu aktor yang memiliki kekuasaan dan control yang cukup tinggi untuk mengalisa untuk membangun nilai potensi desa yang dimiliki. Oleh karena itu pemerintah desa juga termasuk aktor penting yang memiliki wewenang untuk menentukan arah pembangunan desa

maupun menjadikan desa wisata. Governance sendiri memiliki fokus terhadap pentingnya keterikatan para pemegang kekuasaan dalam pembentukan keputusan, karena dalam proses penentuan keputusan dan pengaplikasiannya sudah lebih kompleks akan masalah dan tantangan yang dihadapi Agus (2018).

Menurut Williamson (1975) perubahan transisi dalam desa merupakan hasil dari pembaharuan tubuh tata kelola desa yang dimainkan oleh beberapa aktor penting. Perubahan tata kelola pemerintahan yang cukup luas mencakup tiga yakni, proses baru pengaturan (*new process of governing*), perubahan kondisi kaidah pengaturan (*a changed condition ordered rule*) atau menjadi metode baru dimana sebagian masyarakat diarahkan (*new method by which society is governed*)

Secara mudah governance dipahami sebagai pembaharuan peralihan dalam “penyelenggaraan kebijakan publik” yang mana pemerintah bukan satu satunya sebagai pusat, namun lebih melibatkan aktor lain untuk menarik untuk andil dan berpartisipasi baik masyarakat, swasta, dan *stake holder*. Selain itu governance sendiri memiliki karakter sebagai penunjang dan dasar dari identitas governance itu sendiri. Karakter governance sendiri dibagi menjadi empat yakni,

- a) *Governance* memiliki arti yang cukup luas dari pada government dengan mengikat pemain non negara yang menciptakan hubungan saling mengikat antar organisasi.
- b) Keberlanjutan interaksi hubungan antar individu anggota karena di pengaruhi kebutuhan pertukaran sumber daya dan negosiasi guna berbagi antar sesama.
- c) Bermula dari keterikatan saling percaya dan diatur dengan kebijakan dari negosiasi dan kerjasama antar aktor.
- d) Memiliki derajat signifikan guna terlepas dari pemerintah. (E, 1975).

Pada intinya karakteristik dari governance akan berbeda pada siapa yang memiliki wewenang, kekuatan, dan pengaruh untuk mengatur dan mengkoordinasikan sebuah program, kebijakan, dan proyek dan aturan yang ada menurut Hanberger (2004).

Dari uraian diatas menurut penulis governance memiliki makna sebagai aktor yang memiliki wewenang untuk merubah, merencanakan, membentuk suatu aturan dan kebijakan yang dapat mempengaruhi pihak pihak untuk mengikuti apa yang mereka pengaruhi secara langsung maupun tidak langsung.

2. Collaborative Governance

Dalam menjalankan kebijakan dan pelaksanaan program, pemerintah tidak bisa jika hanya mengandalkan komponen kapasitas internal yang dimilikinya saja. Hal ini didasarkan pada adanya keterbatasan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki internal pemerintah. Jika ditinjau lebih lanjut pemerintah tentu memerlukan kemampuan sumberdaya dan juga jaringan dari pihak eksternal yang akan menjadi pendukung terwujudnya pelaksanaan program dan kebijakan yang dibuat. Purwanti (dalam Febrian, 2016) mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan terlaksananya program serta kebijakan, pemerintah perlu mengadakan kerjasama dengan berbagai pihak. Dalam hal ini , kerjasama yang dimaksud adalah antara pemerintah dengan pihak swasta atau sesama pemerintah dengan bidang lain. Tidak terbatas hanya disitu saja, kerjasama ini juga berlaku antara pmerintah dengan masyarakat, pihak swasta dengan masyarakat ataupun ketiganya yakni pemerintah, masyarakat dan juga pihak swasta. Ini ditujukan semata mata untuk terjalinya kerjasama kolaboratif guna mewujudkan tujuan program dan kebijakan pemerintah.

Melihat banyaknya pertumbuhan desa wisata disetiap wilayah yang berbeda. Maka hal itu menandakan adanya perkembangan antara

masyarakat dengan, pemerintah desa maupun *stakeholder*. Implementasi collaborative governance berarti tidak hanya sebatas pemahaman teori semata namun bisa dijalankan dan diterapkan sebagaimana mestinya. Seperti sektor pemerintahan dan pembangunan. Mulai dari proses transformasi pemerintahan dan pembangunan yang berhasil seperti kampung kumuh dimalang menjadi kampung warna-warni yang cukup indah dan sebagainya. Proses collaborative governance antara akademisi, private sector, government dan civil society peran mereka semua merupakan kunci dalam sebuah keberhasilan.

Pemaknaan Collaborative Governance menurut (Ansel, 2008) adalah suatu pengelolaan pemerintahan yang melibatkan secara langsung kepentingan di luar negara ataupun pemerintahan, hal tersebut dititik beratkan pada musyawarah serta konsensus dalam proses pengambilan keputusan dimana mempunyai tujuan untuk membuat maupun melaksanakan kebijakan publik serta program-program publik.

Collaborative Governance dimaknai sebagai proses yang melibatkan berbagai stakeholder terkait dengan membawa kepentingan masing-masing dengan tujuan untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai secara bersama sama menurut Cordery (2004). Pendapat lain yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash dalam Febrian (2016) memberikan defisini collaborative Governance sebagai sebuah cara untuk mengatur satu atau beberapa lembaga yang secara langsung terlibat dalam proses penentuan suatu kebijakan.

Berdasarkan dua pendapat diatas, maka kita dapat mengetahui bahwa Collaborative Governance ini memiliki beberapa ciri khusus yang dapat dikenali yakni :

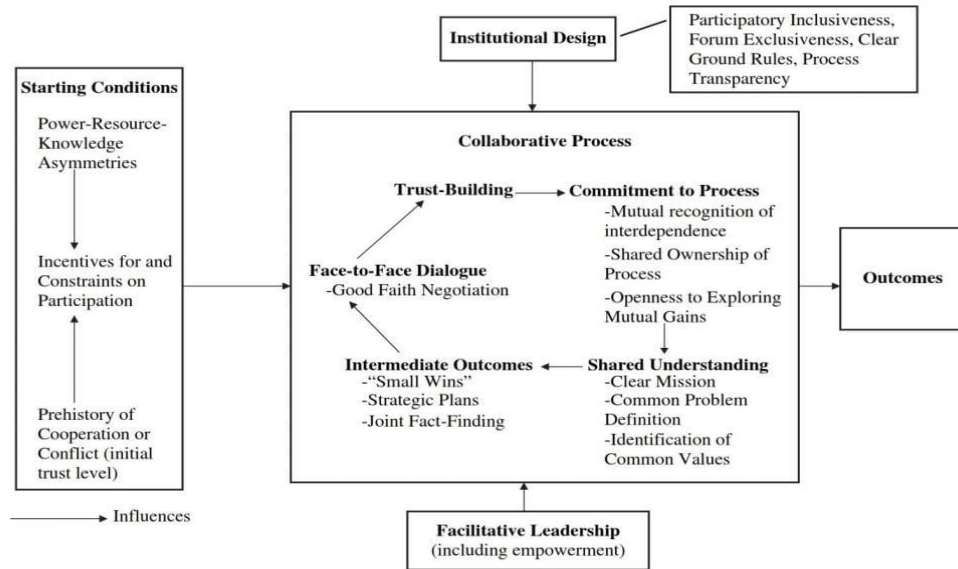
- a. Kegiatan ini dilaksanakan oleh lembaga publik. Aktor-aktor dalam tiap-tiap lembaga yang bekerjasama juga terlibat di dalamnya
- b. Disini juga terdapat aktor non publik
- c. Seluruh stakeholder terlibat secara langsung dalam proses penentuan kesepakatan (konsensus) kebijakan
- d. Memiliki sistem yang terorganisir secara formal dan legal. Ini yang mendasari proses pertemuan antar stakeholder harus dilakukan secara bersama-sama
- e. Forum digunakan untuk merumuskan konsensus melalui musyawarah untuk menyepakati sebuah keputusan bersama
- f. Kolaborasi yang terjalin memiliki orientasi pada proses kebijakan publik dan juga manajemen publik

Dengan demikian Collaborative Governance ini merupakan forum yang memiliki keterikatan secara formal. Bahkan karena adanya keterlibatan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan juga masyarakat publik maka forum ini juga dapat disebut sebagai “Multipartner Governance”. Ini meliputi sektor privat, masyarakat dan tidak terlepas dari komunitas-komunitas sipil yang terdapat pada ada Balogh (2011).

3. Metode Collaborative Governance

Berdasarkan Jurnal berjudul Collaborative Governance in Theory and Practice yang ditemukan oleh Ansel dan Gash (2008) merumuskan model Collaborative Governance berdasarkan kajian literatur. Hasil kesimpulan kajian tersebut digambarkan dalam 4 (empat) variabel utama, terdiri dari: (1) Starting Condition; (2) desain kelembagaan; (3) kepemimpinan; dan (4) proses kolaboratif.

Gambar 2. 1 Model Collaborative Governance



Sumber: Ansell and Gash (2008), *“Collaborative Governance in Theory and Practice”*

Proses dari suatu kolaborasi dilkakukan dalam beberapa tahapan. Suatu tahapan model kolaborasi menjadi penting untuk diperhatikan sebagai strategi dalam aspek pengelolaan suatu urusan publik. Meskipun proses kolaboratif sulit untuk dilaksanakan karena karakter-karakter dari tiap stakeholder yang berbeda satu dengan yang lainnya.

1) Starting Condition

Starting Condition sangat berpengaruh karena hal tersebut terjadi sebelum adanya kolaborasi terjadi, terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerja sama antara pemangku kepentingan, dan antara lembaga/ organisasi dengan pemangku kepentingan. Terdapat 3 (tiga) variable besar kondisi diawal ini antara lain: ketidakseimbangan antara pengaruh/ kekuatan, sumber daya, pengetahuan pemangku kepentingan; sejarah di masa lalu yang terjadi baik berupa kerjasama yang telah dilakukan sebelumnya ataupun konflik yang pernah terjadi diantara

pemangku kepentingan; dan bentuk dorongan dan kendala dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi

2) Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses berkolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

3) Kepemimpinan

Dalam berkolaborasi sangat mungkin terjadi atau ditemukan adanya konflik/ perselisihan yang tinggi dan adanya ketidakpercayaan yang besar antara pemangku kepentingan, namun disisi lain biasanya terdapat keinginan yang besar pula para pemangku kepentingan untuk ikut berpartisipasi, maka disinilah dibutuhkan kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh para pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi. Kepemimpinan yang kuat yakni dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan akan sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi karena akan lebih mungkin kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.

4) Proses Kolaboratif

Awal dari proses kolaborasi sangat sulit ditentukan akan dimulai darimana. Dari kelima proses kolaboratif (lihat gambar diatas), dapat dimulai dari mana saja.

a. Dialog Tatap Muka

Semua collaborative governance dibangun berdasarkan adanya “dialog antara para pemangku kepentingan”. Dialog ini sebagai sebuah proses, yang berorientasi pada lahirnya konsensus/kesepakatan. Dialog pemangku kepentingan ini biasanya dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dengan mengedepankan narasi bahwa akan adanya keadaan “saling menguntungkan” para pemangku kepentingan bila dapat berkolaborasi.

b. Membangun kepercayaan

Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan diantara para pemangku kepentingan. Proses dalam membangun kepercayaan merupakan proses jangka panjang yang memakan waktu dan membutuhkan komitmen yang tinggi.

c. Komitmen dalam proses kolaborasi

Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan kemungkinan akan meningkatkan komitmen untuk berkolaborasi. Perlu ditekankan bahwa berkolaborasi bukanlah kesepakatan satu kali akan tetapi merupakan sebuah proses kegiatan kerjasama yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.

d. Pemahaman Bersama

Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama ini dapat berupa adanya tujuan bersama yang jelas, definisi masalah yang dihadapi bersama juga sudah jelas dan pemahaman bersama mengenai nilai yang akan di capai dalam berkolaborasi.

e. Hasil Antara (pertengahan)

Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (pertengahan) dari proses kolaborasi. Hasil kecil (small win) ini dapat menjadi pendorong dalam membangun kepercayaan dan komitmen bersama para pemangku kepentingan

Berdasarkan penjabaran teori diatas dengan fenomena yang terjadi dalam perumusan masalah penulisan kali ini menemukan beberapa permasalahan pada Desa Nyatnyono terutama di bidang sektor pariwisata. Beberapa permasalahan tersebut yakni di antaranya: rendahnya kualitas sebagian pelayanan publik yang menyebabkan iklim investasi kurang kondusif sehingga dari hal tersebut dapat melemahkan daya saing Desa Nyatnyono, kurang adanya kemauan dari masyarakat untuk berwirasuaha sehingga menghambat penciptaan lapangan kerja dan kemandirian perekonomian, serta ketidakselarasan antar perangkat desa dalam menjalankan regulasi yang telah ditetapkan Dari uraian di atas tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah desa Nyatnyono untuk dapat menjadi pembenahan ke depannya.

BAB III

GAMBARAN UMUM PROFIL DESA SERTA PEMERITAHAN DESA NYATNYONO KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG

A. Profil Desa Nyatnyono

a. Gambaran Umum Desa Nyatnyono

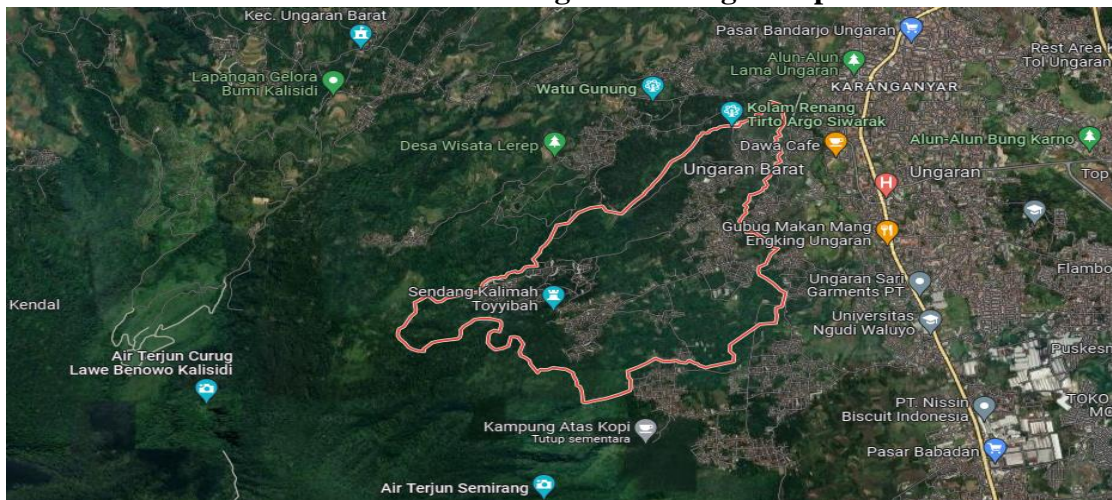
Secara gambaran umum, desa Nyatnyono merupakan sebuah desa yang terletak pada Kecamatan Ungaran barat, Kabupaten Semarang. Menurut profil Desa Nyatnyono secara adminitrasi mempunyai Perangkat Desa sejumlah 20 orang yang terdiri dari 17 orang laki-laki serta 3 orang perempuan, dusun berjumlah 13 dusun, 8 RW, 40 RT, 55 orang Linmas serta mempunyai luasan wilayah sekitar +425 Ha. Dari hasil jarak ukur yang dilihat dari peta kondisi letak Desa Nyatnyono sekitar +2 KM sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat Desa Nyatnyono ke instansi pelayanan masyarakat di tingkat Kabupaten Semarang dan sarana prasana untuk kepentingan masyarakat desa.

Kemudian dari hasil observasi penulis secara langsung pada Desa Nyatnyono, pemerintah Desa mempunyai fasilitas umum yang memadai sebagai penunjang sarana prasana aktivitas kegiatan warga desa. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pelayanan dari perangkat desa seperti halnya pengurusan administrasi masyarakat desa yang responsif terkait pengurusan data kependudukan serta vaksinasi di saat pandemi. Secara Geografis, Desa Nyatnyono mempunyai batas-batas dengan wilayah lain, di antaranya,

Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Lerep. Kemudian, sebelah Selatan, berbatasan dengan Kelurahan Genuk. Sebelah Barat, berbatasan dengan Hutan. Kemudian Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Gogik. Adapun orbitan jarak dari pusat pemerintahan Desa Nyatnyono adalah.

Jarak dari pusat pemerintahan Kecamatan dengan jarak 3,5 km. Jarak dari pusat pemerintahan Kabupaten dengan jarak 4 km. Jarak dari pusat pemerintahan Provinsi dengan jarak 21 km. Jarak dari Ibu Kota Negara dengan jarak 476 km.

Peta Desa dari Jangkauan Google Maps



Gambar 3. 1 Peta Desa Nyatnyono

b. Kondisi Demografis Desa Nyatnyono

a) Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Monografi yang terkait penduduk di Desa Nyatnyono berjumlah 9147 jiwa. Sumber data tersebut di kutip pada tahun 2021 yang penduduknya tersebut terdiri dari laki-laki berjumlah 4608 jiwa serta perempuan berjumlah 4539 jiwa. Sementara itu, jumlah untuk kepala keluarga sendiri yang berada di Desa Nyatnyono berjumlah 2818 orang

Daftar Jenis Kelamin (Data Monografi Desa 2021)

Jenis Kelamin	Jumlah
Laki-Laki	4608
Perempuan	4539

Tabel 3. 1 Daftar Jenis Kelamin

Kemudian, berdasarkan dari penjelasan tabel diatas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara jumlah penduduk perempuan mempunyai selisih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Pada hasil wawancara, peneliti menemukan fakta bahwa, meskipun terbilang banyak masyarakat desa yang merantau atau pindah keluar dari desa, tetapi tidak mengurangi jumlah penduduk secara signifikan. Sebab contohnya pada para pelajar yang menjadi belajar atau menempuh pendidikan santri di luar wilayah luar desa, kecamatan maupun provinsi, mereka akan kembali lagi ke desa. Selanjutnya ada beberapa warga luar daerah yang menikahi penduduk setempat, dan memilih untuk menetap dan menjadi warga Desa Nyatnyono.

b) Agama Masyarakat

Menurut secara data administrasi dari Pemerintah Desa Nyatnyono dengan pelaksanaan observasi yang dilakukan secara langsung oleh peneliti. Agama yang ada di Desa Nyatnyono sama halnya dengan yang ada di wilayah Jawa Tengah secara umum, Agama Islam, Kristen Katholik, Protestan, dan sebagainya. Penduduk yang berada di Desa Nyatnyono mayoritas beragama Islam yang diperkuat dengan pada wilayah tersebut menjadi salah satu markas besar yakni Nahdatul Ulama (NU). Sebagian besar penduduk Desa Nyatnyono merupakan kelompok masyarakat

“Nahdyyin”. Kelompok tersebut secara umum sering juga dikenal dengan kaum santri, dimana dengan tradisi dari masyarakat yakni tahlil, pengajian, shalawatan, serta istighasah.

Selain itu, dari hasil pengamatan yang dilakukan mempunyai fakta yang menyebutkan bahwa, meskipun sebagian besar masyarakat Desa Nyatnyono beragama Islam, tetapi ada juga yang beragama non-Islam atau yang mengaku sebagai penganut kepercayaan. Namun tidak disebutkan secara eksplisit terkait data masyarakat yang menganut penganut. Pada kondisi akhir tahun 2021, diketahui bahwa penduduk Desa Nyatnyono yang beragama Islam ada 8980 orang. Tabel berikut ini berisi tentang agama yang ada di Desa Nyatnyono yang diambil dari data monografi desa.

**Tabel Jumlah Penganut Agama
(Data Monografi Desa 2021)**

NO.	AGAMA	JUMLAH
1.	Islam	8980
2.	Kristen	75
3.	Khatolik	92
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
6.	Konghucu	-

Tabel 3. 2 Data Penganut Agama

Dari penjelasan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas warga Desa Nyatnyono merupakan berpegang agama islam. Namun, tidak dapat dipungkiri ada beberapa warga yang bukan beragama islam. Hal tersebut bukan berarti mengurangi rasa toleransi serta menghormati umat antar beragam.

c) Kondisi Pendidikan

Dari segi pendidikan, warga Indonesia terutama yang tinggal di pedesaan cenderung mempunyai pendidikan rendah bahkan tidak pernah duduk bangku sekolah. Karena dari keterbatasan kualitas pendidikan yang kurang berada masyarakat tersebut demikian, maka sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan mata pencaharian dari perolehan hasil potensi alam yang ada, seperti hutan, kebun, serta sawah.

**Tabel Jumlah Tamat Pendidikan Masyarakat Desa
(Data Monografi Desa 2021)**

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Tidak/Belum Sekolah	2307
2.	Belum Tamat SD/Sederajat	819
3.	Tamat SD/Sederajat	2053
4.	SLTP/Sederajat	1876
5.	SLTA/Sederajat	1538
6.	Diploma I/II	11
7.	Akademi/DIII/Sarjana Muda	118
8.	Diploma IV/Strata I	396
9.	Strata II	28
10.	Strata III	1

Tabel 3. 3 Data Pendidikan Warga Nyatnyono

Dari penjelasan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa masyarakat Desa Nyatnyono yang melanjutkan studi ke dunia perkuliahan cukup banyak, dengan rata-rata D-I/D-II 11 orang, D-III/Akademi 118 orang, D-IV/S-I 396 orang, S-II dan S-III

masing-masing 28 dan 1 orang. Hal ini menjawab asumsi umum bahwa rata-rata pendidikan masyarakat desa tradisional mayoritas SD dan paling tinggi SMA. Statement tersebut menjadi pembuktian bahwa cukup banyak orang tua yang mampu menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi. Secara khusus Strata 1 dan Diploma IV yang tergolong cukup banyak pada kategori wilayah desa yaitu 396 orang. Peneliti berhasil melakukan temuan data dari hasil wawancara dan data monografi ini membuktikan bahwa kualitas pendidikan di Desa Nyatnyono cukup baik. Sebab banyak wali atau orang tua yang peduli dengan pendidikan serta masa depan anak-anak mereka.

d) Jenis Sarana dan Prasarana

Desa Nyatnyono yang memiliki ikon sebagai desa wisata religi memiliki keunikan tersendiri. Keunikan tersebut dimanfaatkan untuk membangun atau menata sarana dan prasarana desa. Berdasarkan data monografi Desa Nyatnyono, sarana dan prasarana desa dibagi menjadi 4 bagian, yakni sarana peribadatan, sarana pendidikan, sarana umum, sarana kesehatan. Sarana dan prasarana bagi masyarakat Nyatnyono menunjang aktivitas masyarakat, serta manfaatnya berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraannya. Berikut adalah tabel yang berisi mengenai daftar sarana dan prasarana yang tersedia di Desa Nyatnyono

DAFTAR TABEL SARANA PRASARANA

NO.	SARANA & PRASARANA	JENIS SARPRAS	JUMLAH
1.	SARPRAS PERIBADATAN	Masjid	11 Buah
		Musholla	27 Buah
		Gereja	0 Buah
2.	SARPRAS PENDIDIKAN	PAUD	3 Buah
		TK/RA	4 Buah
		SD/MI	4 Buah
		SMP	1 Buah
		Perpustakaan Desa	1 Buah
3.	SARPRAS UMUM	Olahraga	11 Buah
		Kesenian/Budaya	8 Buah
		Balai Pertemuan	1 Buah
4.	SARPRAS KESEHATAN	Puskesmas	-
		Poskesdes	1 Buah
		UKBM (Posyandu/Polindes)	11 Buah

Tabel 3. 4 Data Sarana dan Prasarana Warga Nyatnyono

Menurut gambaran tabel diatas terlihat bahwa Pemerintahan Desa Nyatnyono mempunyai sarana dan prasarana yang cukup menunjang kegiatan masyarakat Desa Nyatnyono. Maka dari itu, pada dasarnya sarana dan prasarana sangat diperlukan oleh masyarakat desa Nyatnyono guna mendukung roda perekonomian desa agar dapat tumbuh dan berkembang dengan cepat. Peluang usaha bagi masyarakat desa dapat diberikan melalui perkembangan

ekonomi dan mampu menekan jumlah masyarakat miskin yang ada di desa (Kementerian Desa, 2016).

Adapun beberapa tempat yang menunjang potensi pariwisata di lingkup Desa Nyatnyono dimana sudah sangat dikenal bagi para peziarah serta santri dari luar kota. Menurut dalam data monografi Desa Nyatnyono, tempat sektor wisata tersebut antara lain :

- a) Pemandian Air Sendang Kalimah Toyyibah
- b) Komplek Pemakaman Waliyulloh Hasan Munadi dan Hasan Dipuro

c. Kondisi Sosial dan Politik

Masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Nyatnyono merupakan masyarakat mempunyai karakteristik beragam. Yang dimaksud beragam disini merupakan warga Desa Nyatnyono sendiri mempunyai golongan yang sama. Kondisi sosial politik masyarakat yang di Desa Nyatnyono sebagian besar mayoritas merupakan golongan Nahdlatul Ulama (NU).

Kemudian, ada hal yang berkaitan dengan konteks tersebut untuk dibahas melainkan berdasarkan kondisi sosial politik di Desa Nyatnyono. Mayoritas penduduk Desa Nyatnyono. Politik merupakan sebuah upaya yang diberikan kepada masyarakat dalam menemukan haknya sebagai warga Negara. Untuk menampung aspirasi dan menunjukkan eksistensi terhadap suatu Negara itu sendiri. Dengan politik masyarakat dapat memilah serta memilih apa yang diinginkan untuk mencapai kesatuan dan persatuan, demi keutuhan bangsa yang cenderung memilih jalan demokratis dalam menentukan segala kelangsungan hidupnya (Simon, 2000).

Sama dengan desa yang lain pada umumnya di Indonesia, Desa Nyatnyono juga seringkali terjadi konflik dan politik kepentingan demi memperebutkan maupun mempertahankan

kekuasaannya dimana hal tersebut dilakukan oleh pemangku kebijakan atau tokoh penting yang berada di Desa Nyatnyono. Hal tersebut sangat berkaitan dengan adanya potensi desa ataupun sesuatu hal yang penting untuk dimanfaatkan oleh segelintir orang.

Masyarakat Desa Nyatnyono tergolong masyarakat yang mengerti dan sadar adanya politik, hal tersebut dapat ditinjau dari kuatnya antusiasme masyarakat dalam setiap kesempatan menjelang pemilihan umum ditingkat desa. Perbedaan penduduk dalam memilih di desa Nyatnyono ternyata tidak menghasut terjadinya konflik di antara warga. Pada realita yang terjadi dapat dilihat dari hasil pemilihan calon kepala desa (pilkades) yang dilaksanakan pada periode lalu tidak berpengaruh pada kondisi warga. Dengan hal itu, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Nyatnyono mulai adanya kesadaran untuk menghadapi pemilihan umum secara demokratis.

d. Kondisi Topografis Desa Nyatnyono

Desa Nyatnyono memiliki topografi dengan kontur tanah bersifat perbukitan yang dipenuhi oleh lahan perkebunan yang cukup luas. Sebab letaknya yang berada di kaki Gunung Ungaran. Ketinggian Desa Nyatnyono berkisar 600-800 MDPL. Juga memiliki suhu udara berkisar 24-28°C, dengan tipologi tanah berbukit sedang dan sebagian konturnya cenderung datar (Sartika, Adinugraha, & Kinansih, 2018). Dari suhu udara sejuk serta dingin tersebut membuat Desa Nyatnyono cocok untuk menanam tumbuhan yang bersifat subur. Adapun kondisi topografi Desa Nyatnyono yang tinggi menyebabkan desanya potensi panorama yang indah dan ekosistem yang beragam.

Potensi Desa Nyatnyono sebagai wilayah hijau, tidak dapat dilepaskan dari faktor topografinya yang berada di area lereng atau dataran tinggi. Selain tanahnya yang subur, dan kondisi air yang

mengalir deras, wilayah hijau desa disebabkan oleh faktor perkebunan (Hasil wawancara dan Data Monografi Desa Nyatnyono). Kebun di wilayah desa diisi oleh beragam tanaman mulai dari pisang, kopi, jati, cengkeh, pala, dan berbagai macam akar-akaran. Sehingga selain buruh atau membuka usaha, mata pencaharian warga Desa Nyatnyono didominasi oleh petani kebun. Kekayaan alam Desa Nyatnyono tidak dapat dilepaskan dari faktor topografi desa. Ketinggian desa berpengaruh terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh desa tersebut.

Bidang Topografi	Luas Area Topografi
Datar	127,12 Ha
Bergelombang	209,77 Ha
Curam	236,36 Ha
Sangat Curam	109,07 Ha

Tabel 3. 5 Data Luas Topografi Warga Desa Nyatnyono

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa luas area dan kontur bidang tanah yang berada di Desa Nyatnyono memang sangat berpengaruh dengan apa tumbuhan yang akan ditanam. Selain itu, sumber mata air yang berada di Desa Nyatnyono tersebut berasal dari Gunung Ungaran.

B. Potensi Wisata Desa Nyatnyono

a. Komplek Pemakam Waliyullah Hasan Munadi dan Hasan Dipuro

Desa Nyatnyono merupakan desa yang berada di lereng puncak Suroloyo, yang menjadi bagian dari Gunung Ungaran, kawasan yang bisa dikatakan cukup dingin. Nyatnyono dikenal dengan adanya makam Mbah Hasan Munadi dan Mbah Hasan Dipuro, dua tokoh islam yang merupakan sosok waliyullah. Wali penyebar agama Islam di ungaran,

terkhusus Nyatnyono. Pada hari-hari besar Islam, seperti bulan Ramadhan, 1 Syawal, Maulidan dan hari Santri, desa nyatnyono sangat ramai dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah untuk berziarah.



Gambar 3. 2 Pintu Masuk Makam Hasan Munadi dan Hasan Dipuro

Makam Waliyullah Hasan Munadi yang ditutupi kain berwarna hijau yang menyerupai Ka'bah namun lebih kecil dengan bangunan yang berbentuk kubus disertai dengan tulisan-tulisan arab serta batu nisan yang ditutup menggunakan kain berwarna putih. Adanya Makam Waliyullah Hasan Munadi ini dapat meningkatkan jiwa gotong royong masyarakatnya. Hal ini karena masyarakat memiliki perasaan yang sama yaitu memiliki kewajiban untuk ikut melestarikan dan menjaga sejarah hingga dapat diwariskan pada generasi mereka sebagai rasa syukur dan juga bangga atas keberadaan makam Hasan Munadi di Desa mereka dengan melaukukan upacara keagamaan seperti tahlilan atau haul.



Gambar 3. 3 Makam Hasan Munadi



Gambar 3. 4 Makam Hasan Dipuro

Makam Waliyullah Hasan Dipuro terletak di sebelah selatan dari bangunan Makam Waliyullah Hasan. Makam dalam kondisi yang terawat dan bersih karena selalu mendapatkan perawatan yang rutin dari pengelola. Waliyullah Hasan Dipuro mengikuti ayahnya untuk mengajarkan agama Islam.

Setiap hari banyak peziarah yang datang di Desa Nyatnyono, bukan hanya dari Semarang saja melainkan berasal dari berbagai daerah penjuru Indonesia. Setiap minggu pada hari jumat diadakan pengajian, pada hari minggu kebanyakan yang datang adalah anak muda yang hanya ingin melihat-lihat dan berekreasi. Tetapi, pada hari-hari tertentu terdapat rombongan peziarah yang datang menggunakan bis besar yang berasal dari luar kota, antara lain Jawa Barat dan Jawa Timur. Ketika mengunjungi

Makam Hasan Munadi, peziarah tidak dipungut uang. Namun, pihak pengelola makam menyediakan kotak amal yang nantinya uang dari kotak amal tersebut akan digunakan untuk merawat makam.

b. Masjid Sahussalam



Gambar 3. 5 Masjid Sabussalam

Masjid Subussalam yang Berada di Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang merupakan peninggalan dari Waliyullah Hasan Munadi. Masjid ini memiliki kondisi yang baik, terawat, dan juga bersih. Masjid Subussalam merupakan masjid yang dibangun oleh Waliyullah Hasan Munadi. Bahkan dipercaya bahwa Masjid Subussalam ini lebih tua dari Masjid Agung Demak.

Sebelum Waliyullah Hasan Munadi mulai mengerjakan Masjid Subussalam, beliau didatangi oleh Sunan Kalijaga untuk dimintai tolong dalam pembangunan Masjid Demak yang juga akan segera dibangun. Waliyullah Hasan Munadi bersedia membantu dalam

pembangunan Masjid Demak dengan sebuah syarat. Beliau meminta kepada Sunan Kalijaga untuk menyelesaikan masjid yang ada di Desa Nyatnyono sebelum membangun Masjid di Demak. Beliau meminta salah satu soko (tiang penyangga) yang akan digunakan dalam membangun Masjid Demak. Syarat dan permintaan dari Waliyullah Hasan Munadi diterima oleh Sunan Kalijaga. Pada saat awal pembangunan, Masjid Subussalam hanya memiliki satu soko (tiang). Namun pada saat zaman Belanda, Kyai Raden Purwo Hadi menambah soko (tiang) menjadi empat karena dikhawatirkan apabila satu akan disembah. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya umat Islam, Masjid yang memiliki nama lain Masjid Syekh Hasan Munadi mengalami beberapa kali renovasi bangunan.

Pada tahun 1985 Masjid ini direnovasi oleh masyarakat, mereka melakukan renovasi tanpa memindahkan posisi atau menambah/mengurangi empat soko (tiang). Bangunan Masjid ini yang asli terbuat dari kayu tidak bisa bertahan karena dimakan oleh usia, maka itu diganti dengan menggunakan beton dan batu bata agar lebih kokoh. Masjid Sabussalam juga menjadi salah satu daya tarik wisata religi bagi peziarah.

c. Pemandian Air Sendang Kalimah Thayyibah

Menurut sejarah, sendang Kalimah Thayyibah tersebut muncul berawal dari ketika rencana untuk merenovasi masjid Sabulussalam peninggalan dari Waliyullah Hasan Munadi yang sudah memperhatikan. Rencana tersebut dimulai pada tahun 1980. Pada saat itu, sendang sudah ada namun air yang di sana 48 masih kecil tidak sebesar seperti sekarang. Masyarakat pada saat itu juga belum mengetahui manfaat yang ada di air tersebut. Sendang Kalimah Tayyibah Sendang Kalimah Tayyibah mempunyai sumber air yang berasal dari mata air yang berada di pohon beringin yang telah berusia ratusan tahun.

Konon, sumber mata air yang berada di Sendang Kalimah Tayyibah tersebut tidak pernah kering walaupun ketika musim kemarau



Gambar 3. 6 Sendang Kalimah Thayyibah

Sendang Kalimah Thayyibah mempunyai peluang dan potensi menjadi wisata religi yang sangat diminati dan memiliki daya tarik tersendiri. Khususnya banyak di masyarakat muslim yang memiliki tradisi mendatangi makam orang-orang yang sholeh dan memiliki pengaruh pada masa hidupnya, seperti waliyullah. Dan selain memiliki makam waliyullah, desa nyatnyono juga memiliki Sendang Kalimah Thayyibah yang cukup diyakini sebagai suatu hal yang keramat. Banyak para peziarah juga yang setelah berkunjung ke makam, menyempatkan mandi di sendang. Sendang Kalimah Thayyibah ini diyakini mampu menyembuhkan segala penyakit, baik jasmani maupun rohani dan mampu memperlancar Hajat seseorang yang mandi di sendang. Dan dari beberapa warga lokal pun menyediakan jasa pinjam sarung untuk mandi.

BAB IV

STRATEGI KOLOBOLARSI PEMERINTAH DESA NYATNYONO DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA

A. Kebijakan Pengembangan Desa Wisata Nyatnyono

Desa wisata merupakan sebuah bentuk kolaborasi antara atraksi, akomodasi dan sarana pendukung yang menjadi wujud tata kehidupan masyarakat bersatu menjadi satu bersama aturan dan tradisi yang berlaku. Sebuah desa dapat dikatakan desa wisata jika didalamnya mempunyai potensi wisata untuk dikembangkan dengan diikuti adanya tradisi dan budaya. Dasar pengembangan desa wisata adalah mengetahui tentang karakter dan kemampuan elemen dari desa seperti: sosial budaya, ekonomi, kondisi lingkungan, aspek historis, dan kemampuan serta pengetahuan local. Pada SK Keputusan Bupati Semarang Nomor 556/ 0389/ 2020, yang memutuskan penetapan desa wisata di Kabupaten Semarang yang berjumlah 55, Desa Nyatnyono masuk dalam daftar penetapan wisata yang ada di semarang. Sebuah desa yang terletak pada Kecamatan Ungaran barat, Kabupaten Semarang. Desa yang dikenal dengan wisata religinya.

Desa Nyatnyono mempunyai banyak potensi pariwisata mulai dari Makam Mbah Hasan Munadi dan Hasan Dipuro serta Sendang Karomah Kalimah Thayyibah. Potensi desa Nyatnyono sangatlah bagus, jika dilihat secara topografinya yang berada di area lereng gunung atau dataran tinggi. Selain memiliki tanah yang subur, kondisi air yang mengalir deras dan didukung wilayah hijau desa yang disebabkan oleh perkebunan, membuat wisata di desa Nyatnyono memiliki suasana yang sejuk dan daya tarik tersendiri. Dari beberapa unsur yang memenuhi sebagai pengembangan desa wisata, desa nyatnyono sudah berupaya mengembangkan wisatanya, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Nyatnyono, mengatakan:

“Kami dari pihak desa terus berupaya memperbaiki sarana dan fasilitas untuk menuju objek makam dan sendang, pengaspalan dan adanya transportasi menuju makam yang dibantu oleh ojek-ojek dari

penduduk lokal yang sekarang sudah ada paguyubannya.”
(Wawancara, Bapak Parsunto, 5 Desember 2022)



Gambar 4. 1 Paguyuban Ojek Wisata Nyatnyono

Dan dalam pengelolaannya, desa Nyatnyono mendapatkan anggaran dari Pemerintah Desa pertahunnya. Yang mana Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Ketinggalan dan Transmigrasi Republik Indonesia sudah mengeluarkan Permendes Nomor 14 Tahun 2020 mengenai dana desa. Dalam Permendes yang sudah tercantum, dana desa bisa dipakai untuk aktivitas peningkatan desa wisata. Dengan ditindak lanjuti Permendes Nomor 14 Tahun 2020, desa bisa meningkatkan kekuatan wisata memakai dana desa. Di bawah adalah Anggaran Desa Nyatnyono Tahun 2021 untuk pariwisata

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN (RKP)-DESA TAHUN 2021																		
DESA		NYATNYONO																
KECAMATAN		UNGERAN BARAT																
KABUPATEN		SEMARANG																
NO	JENIS KEGIATAN		LOKASI	VOLUME	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	WAKTU PELAKSANAAN (JANUARI)	ANGGARAN	REKAP RKP DESA NYATNYONO PER ANGGARAN						POLA PELAKSANAAN			PROSE ANTARA PER BIDANG	
	BIDANG	KEGIATAN						SUMBER ANGGARAN						SWAKELOLA	KERJASAMA ANTAR DESA	KERJASAMA ANTAR DESA		RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
								ADD	BHPORD	DD	BANT KAB	BANKELUP	PAD					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
110		Parwisata			Meningkatkan pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa	2021	13,000,000			13,000,000					v			Kasi Pelayanan
111		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa Nyatnyono	1 Paket		2021	13,000,000			13,000,000					v			Kasi Pelayanan

Gambar 4. 2 Tabel RKPDes 2021

Suatu program pembangunan desa merupakan sekumpulan program prioritas yang berhubungan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan desa. Suatu program pembangunan desa dapat berupa pernyataan yang disamakan dengan program kepala desa terpilih, atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala desa terpilih yang didalamnya berisi program prioritas. Program prioritas dirumuskan berdasarkan kebijakan umum dan masing-masing memuat fokus kegiatan yang saling berkaitan dengan indikator kinerja (*outcome*) yang dipersyaratkan.

Anggaran ini untuk biaya pengelolaan dan perawatan wisata yang ada di desa nyatnyono.

“Kami dari pihak desa, menganggarkan untuk wisata, dan pertahunnya biasanya turun dananya, yang nanti akan digunakan untuk pengelolaan dan perawatan wisata”. (Wawancara, Bapak Parsunto, 5 Desember 2022).

Berangkat dari penjelasan diatas, pemerintah desa nyatnyono sangat menyambut baik dan optimis untuk terus memberikan pengembangan terhadap wisata di desanya. Dan memenuhi syarat dalam hal pengembangan wisata, yang salah satunya mencakup tentang Akseibilitas berupa rute dan jalur transportasi menuju objek wisata, yang sekarang sudah dibantu dengan adanya ojek dari penduduk lokal yang sudah di wadahi melalui paguyuban. Dan menurut Suwanto (1997: 9) mengatakan bahwa penunjang pengembangan wisata, yakni dengan memperhatikan kelengkapan tujuan wisata dan kebutuhan wisatawan, yang dalam hal ini biro perjalanan atau transportasi. Meskipun dilain sisi, dalam proses pengembangannya tentu

memiliki kekurangan, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Nyatnyono, mengatakan:

“Kendala yang sekarang dialami adalah untuk bagian sendang terkait dengan perluasan wilayah karena terbilang sempit. Penyebabnya adalah bagian selatan sudah berbatasan dengan sungai, kemudian bagian timur sudah menjadi wilayah perseorangan. Kalau bagian makam permasalahannya adalah adanya pihak yang ikut campur karena dianggap makam tersebut masih keturunan dari keluarga wali di mana pemdes tidak bisa mengelola sepenuhnya.” (Wawancara, Bapak Parsunto, 5 Desember 2022)

Keterangan di atas, dapat dilihat bahwa dalam pengembangan wisata di desa nyatnyono masih memiliki beberapa kendala, di antaranya perluasan wilayah yang berbatasan dengan sungai dan di bagian lainnya masih dimiliki oleh perorangan dan dipihak yang lain objek wisata berupa makam, masih adanya pihak yang intervensi atau ikut campur dari pihak keturunan, sehingga dari pemerintah desa tidak bisa mengelola secara penuh. Dan apabila ditinjau dari pendekatan fisik pengembangan desa, belum bisa memenuhi dikarenakan terkendala oleh perluasan lahan yang tidak memungkinkan karena beberapa faktor.

B. Strategi Pengembangan Wisata

Dalam pengembangan wisata, setiap tempat pariwisata memiliki strategi untuk mengembangkan wisatanya menjadi lebih baik lagi dan tentunya agar mengalami peningkatan, serta mampu menarik daya minat para pengunjung. Di desa nyatnyono dalam mengembangkan wisatanya, juga memiliki strategi untuk mengembangkan wisatanya. Sebagaimana yang telah dilakukan Pemerintah desa dan Bumdes yang menyediakan jasa angkutan wisata yang berada di dekat terminal dan adanya kerjasama

dengan paguyuban ojek yang diberikan nama “Ojek wisata”. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Nyatnyono mengatakan:

“Kami dari pihak desa terus berupaya memperbaiki sarana dan fasilitas untuk menuju objek wisata makam dan sendang, pengaspalan dan adanya transportasi menuju makam yang dibantu oleh ojek- ojek dari penduduk lokal yang sekarang sudah ada paguyubannya”. (Wawancara, Bapak Parsunto, 5 Desember 2022).

Dari penjelasan di atas, terlihat adanya suatu strategi dari desa nyatnyono untuk mengembangkan wisatanya dengan menyediakan fasilitas transportasi untuk para pengunjung agar dapat memberikan kenyamanan dalam berkunjung di wisata religi desa nyatnyono. Sehingga pengunjung atau peziarah yang memiliki usia lanjut, bisa menempuh objek wisata dengan mudah, cepat dan nyaman. Terlebih letak jasa angkutan wisata ini dekat dengan terminal yang ada di desa nyatnyono.

Dan di desa nyatnyono, pada hari- hari besar Islam seperti bulan Ramadhan, 1 Syawal, Maulidan dan Hari Santri, desa nyatnyono sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah, bahkan sampai di luar Semarang untuk berziarah ke Makam Mbah Hasan Munadi dan Mbah Hasan Dipuro yang merupakan dua tokoh Waliyullah yang ada di desa nyatnyono.

“Di Desa Nyatnyono itu, kalau bulan puasa, khususnya tanggal 21 Ramadhan banyak sekali pengunjung dan peziarah berdatangan dari luar kota Semarang. Sampai kadang jalan itu macet dan penuh oleh peziarah dan para pedagang yang berjualan juga. Selain bulan Ramadhan, juga biasa ramai pengunjung di bulan 1 Syawal dan bulan Maulid”. (Wawancara masyarakat setempat, Mas Balya, 3 Desember 2022).

Pada hari-hari besar ini dijadikan momentum oleh pihak Pemerintah Desa untuk mengoptimalkan potensi dengan menggandeng Bumdes dan Pokdarwis dengan memiliki strategi memberikan ruang untuk para penduduk lokal untuk berjualan di sekitar objek wisata. Sehingga membuat para pengunjung merasa senang ketika datang di wisata desa nyatnyono karena suasana yang ramai.

Dalam hal ini, wisata desa nyatnyono nyatnyono juga memiliki seperti Sendang Kramat atau Sendang Kalimah Thayyibah ini diyakini mampu menyembuhkan segala penyakit, baik jasmani maupun rohani dan mampu memperlancar Hajat seseorang yang mandi di sendang, yang banyak pengunjung untuk menyempatkan diri mandi setelah berkunjung ke makam Mbah Hasan Munadi dan Mbah Hasan Dipuro. Ini juga dijadikan pemanfaatan oleh pihak pengurus desa, khususnya untuk strategi pengembangan dengan menyediakan jasa pinjam sarung untuk pengunjung yang lupa untuk membawa baju ganti. Dan dari beberapa warga lokal pun menyediakan jasa pinjam sarung untuk mandi, yang dijelaskan juga oleh pengurus, mengatakan:

“Disini kami para penduduk lokal juga menyediakan sarung buat para peziarah yang lupa membawa pakaian buat mandi atau baju buat ganti. Jadi kami para penduduk lokal menyediakan pinjaman dengan harga pinjam 1.000 rupiah. Dari hasil pinjaman ini lumayan buat pemasukkan perekonomian penduduk local yang ada di wisata sendang”. (Wawancara, Pengurus Wisata, 4 Desember 2022)

Dari wawancara di atas, terlihat adanya upaya strategi yang dijalankan oleh pihak pengurus dengan menyediakan jasa pinjam sarung, yang mana memberikan fasilitas nyaman untuk pengunjung yang lupa membawa baju ganti, namun ingin mandi di Sendang Kalimah Thayyibah. Ini merupakan fasilitas yang sangat mendukung untuk berkembangnya wisata yang ada di desa nyatnyono untuk menarik daya minat pengunjung untuk merasakan kenyamanan berwisata di desa nyatnyono. Selain

memberikan kenyamanan, pihak wisata pun mendapatkan pemasukan dengan adanya jasa pinjam sarung ini.

C. Pelaksana Pengembangan Wisata

Kolaborasi atau Collaborative Governance dimaknai sebagai suatu proses yang melibatkan berbagai stakeholder terkait dengan membawa kepentingan masing-masing dengan tujuan untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai secara bersama. Dan Pengembangan desa wisata, tidak bisa hanya dijalankan oleh komponen internal dan pemerintah desa setempat saja dalam menjalankan kebijakan dan pelaksanaan program. Hal ini didasarkan oleh adanya keterbatasan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki internal pemerintah desa nyatnyono. Menurut Purwadi (dalam Febrian, 2016), bahwa untuk mewujudkan terlaksananya program serta kebijakan, pemerintah perlu untuk mengadakan kerjasama dengan pihak lain. Karena jaringan dan sumber daya dari eksternal yang akan mendukung terwujudnya pelaksanaan program dan kebijakan yang dibuat. Desa nyatnyono dalam upaya pengembangan desa wisata, tidak luput dari kolaborasi yang terjalin, seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Nyatnyono mengatakan:

“Beberapa tahun yang lalu, pemerintah desa nyatnyono terjalin kerjasama dengan pihak rokok, Jarum 76. Dari pihak Jarum 76 memberikan kepada kami sumbangan dana untuk dibangunnya Gapura masuk ke desa nyatnyono. Pihak Jarum 76 menganggap wisata di desa nyatnyono memiliki potensi yang besar dikemudian harinya, dan dari pihak desa juga mendapatkan pemasukan dari adanya kerjasama ini”. (Wawancara, Bapak Parsunto, 5 Desember 2022).



Gambar 4. 3 Gambar Gerbang Utama Desa Nyatnyono

Kolaborasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa nyatnyono, sangat lah berdampak baik untuk pembangunan desa wisata. Hal ini menguntungkan di kedua belah pihak, antara pemerintah desa nyatnyono dan pihak jarum 76. Pemerintah desa mendapatkan dana untuk pembangunan gapura, serta pemasukkan dana desa dan di lain sisi pihak jarum mendapatkam promosi produknya di tempat wisata desa nyatnyono. Namun pasca pandemi, belum ada pihak stakeholder yang menawarkan diri untuk berkolaborasi atau pun berkerjasama dengan pihak wisata.

“Untuk sekarang, setelah pandemi belum ada pihak yang mengajukan untuk berkolaborasi dengan pihak wisata”.
(Wawancara, Bapak Parsunto, 5 Desember 2022).

Terjalannya suatu kolaborasi di wisata desa nyatnyono, biasanya terjalin ketika ada stakeholder yang datang ke desa dan menawarkan

pihaknya untuk berkolaborasi atau memberikan sponsor di wisata religi nyatnyono. Seperti yang sudah terlaksana dengan Jarum 76.

“Karena desa sudah menjadi desa wisata, biasanya sponsor yang datang untuk bekerjasama”. (Wawancara, Bapak Parsunto, 5 Desember 2022).

Menurut pernyataan hasil wawancara di atas, pihak wisata nyatnyono tidak kepada mencari pihak untuk berkolaborasi, tapi lebih kepada menerima tawaran kolaborasi atau sponsor. Dikarenakan dari pihak wisata nyatnyono, menegaskan kalau pihak mereka sudah menjadi desa wisata, dan biasanya dari pihak wisata hanya menerima sponsor- sponsor yang ingin menawarkan pada pihak wisatanya. Dengan adanya kolaborasi dari pihak luar atau sponsor, biasanya pihak dengan menggandeng bumdes dan pokdarwis.

“Biasanya Pemdes menggandeng Bumdes dan Pokdarwis mengenai pariwisata kepada pihak luar”. (Wawancara, Bapak Parsunto, 5 Desember 2022).

Dari penjelasan- penjelasan di atas, mulai dari potensi, pengembangan wisata dan kolaborasi untuk pengembangan wisata, dengan dikaitkan teori Collaborative Governence berdasarkan pendekatannya menurut Ansel dan Gash yaitu pertama, Kondisi awal sebelum kolaborasi terdapat kondisi yang menjadi pendukung dan penghambat kerjasama antara pemangku kepentingan dan antara lembaga/ organisasi dengan pemangku kepentingan. Kolaborasi yang sudah pernah dijalin antara pihak wisata desa nyatnyono dan Jarum 76. Yang menjadi pendukung untuk keberlangsungan pembangunan wisata, di mana pihak Jarum 76 memberikan dana untuk dibangunnya Gapura di pintu masuk desa nyatnyono. Sebelumnya desa nyatnyono belum membangun gapura sebagai pintu masuk desa. Dan pihak desa mendapatkan pemasukkan dari kolaborasi tersebut. Sedangkan dari

pihak Jarum 76 mendapatkan promosi produk di wisata desa nyatnyono yang banyak dikunjungi wisatawan. Keduanya membentuk suatu dorongan dan kendala diselesaikan dengan partisipasi dalam kolaborasi.

Kedua, desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, yang ditekankan pada bagaimana aturan main, forum yang dibentuk dan aturan pelaksanaan. Desain desa nyatnyono menjadi desa wisata, merupakan potensi untuk berkembangnya perekonomian dan berkembangnya desa dengan pengenalan wisata yang ada, sehingga desa nyatnyono sebagai desa wisata membuka sponsor dan kolaborasi pihak luar, dengan kerjasama seperti pembangunan gapura. Dengan forum melibatkan kepala desa Nyatnyono

dan pengurus wisata dan pihak luar yang mengajukan kolaborasi. Yang nantinya akan dibuat kesepakatan secara bersama.

Ketiga, kepemimpinan yang dapat diterima dan dipercaya oleh pemangku kepentingan yang dapat diandalkan sebagai mediator di dalam kolaborasi. Desa nyatnyono, dalam terjalannya kolaborasi dengan pihak stakeholder luar dipimpin oleh kepala desa sebagai pimpinan tertinggi di desa yang memutuskan kebijakan penting dan bertanggung jawab atas berkembang dan majunya desa wisata yang ada di nyatnyono, dengan di dukung oleh bumdes dan pokdarwis.

Keempat, proses kolaborasi membangun kepercayaan. Desa nyatnyono sudah menjadi wisata yang cukup banyak dikunjungi dan terkenal, mengingat wisata religi ini mempunyai makan dari waliyullah bernama Mbah Munadi dan sendang yang memiliki daya tarik tersendiri untuk para peziarah yang berkunjung. Dan di hari-hari besar Islam seperti bulan maulid, bulan ramadhan dan 1 syawal yang banyak dikunjungi wisatawan untuk berziarah membuat pihak Jarum tertarik karena melihat potensi wisata desa nyatnyono kedepannya akan lebih besar.

Penjelasan di atas, jika dilihat menggunakan konsep proses kolaboratif terhadap kelima proses kolaborasi, yaitu Dialog Tatap Muka, Membangun Kepercayaan, Komitmen dalam kolaborasi, Pemahaman Bersama dan Hasil Antara. Pertama, Dialog tatap muka, yaitu Kolaboratif yang dibangun berdasarkan adanya dialog antara para pemangku kepentingan. Dialog ini sebagai sebuah proses yang berorientasi pada lahirnya kesepakatan. Hal ini terlihat dalam upaya pemerintah desa Nyatnyono yang memberikan ruang untuk memutuskan kepemimpinan wisata yang dilakukan dengan musyawarah tingkat desa dan melakukan pertemuan- pertemuan untuk kepentingan wisata.

Kedua, Membangun Kepercayaan. Membangun kepercayaan tidak dapat dipisahkan dari proses dialog. Para pemimpin kolaborasi harus mampu membangun kepercayaan satu sama lainnya. Dalam membangun kepercayaan, pemerintah desa nyatnyono dan elemen yang terlibat, terus menjalankan tugas- tugas dan fungsinya untuk perbaikan dan kenyamanan wisatawan dan peziarah. Misalnya yang dilakukan oleh pihak bumdes yang memfasilitasi transportasi berupa jasa angkut serta ojek wisata dan pihak karangtaruna yang menjadi pengurus wisata yang terus mempromosikan wisatanya kepada para peziarah dan wisatawan.

Ketiga, Komitmen dalam proses kolaborasi. Adanya kondisi saling ketergantungan yang tinggi diantara para pemangku kepentingan untuk meningkatkan komitmen kolaborasi. Pengembangan wisata yang ada di desa nyatnyono, terus menjalankan komitmen atas kolaborasi dipihak internalnya yang dibuktikan dengan adanya pihak-pihak yang terus menjalankan fungsinya dengan baik. Seperti pihak desa yang terus memberikan sokongan dana melalui perancangan dana dianggaran tahunan, dan bumdes yang selalu memberikan fasilitas melalui penyediaan transportasi untuk menuju objek wisata. Dengan dibantu oleh karangtaruna sebagai pihak pengurus wisata di desa nyatnyono. Meskipun dalam komitmen bersama ini memiliki kendala dengan satu pihak yang tidak aktif atau mengalami kevakuman.

Keempat, Pemahaman bersama. Pada titik tertentu, para pemangku kepentingan harus mampu mengembangkan pemahaman bersama tentang apa yang dapat dicapai. Pemahaman bersama yang ada di desa nyatnyono, ada pada situasi keputusan yang diambil secara bersama, misalkan ketika ada kolaborasi dari pihak luar, biasanya Pemerintah desa menjalin kerjasama dengan bumdes, pengurus wisata dan Pokdarwis. Ketidaksepahaman ini terjadi hanya pada satu pihak, yakni Pokdarwis. Pokdarwis yang mengalami kevakuman.

Kelima, Hasil antara. Kolaborasi lebih mungkin berlanjut ketika hasil dari tujuan dan keuntungan dari kolaborasi dapat dirasakan secara nyata walaupun masih kecil sebagai sebuah hasil antara (Pertengahan) dari Proses kolaborasi. Di desa nyatnyono ketika pihaknya berkolaborasi dengan pihak Jarum 76, mendapatkan hasil yang baik juga, terutama dengan dibuatkannya gapura dipintu masuk desa nyatnyono atas kerjasama yang sudah dilakukan antara pihak wisata dan jarum 76. Dan dipihak internal dengan segala elemen yang terlibat seperti bumdes, karangtaruna dan Pokdarwis juga memiliki peran yang cukup menguntungkan atas pengelolaan angkutan wisata yang dikelola oleh bumdes dan peminjaman jasa sarung oleh karangtaruna sebagai pengurus wisata. Ini merupakan hal yang cukup memberikan kenyamanan para wisatawan dan peziarah dan daya tarik tersendiri bagi pengunjung, serta menjadikan pengembangan wisata di desa nyatnyono lebih diminati. Dengan hal ini juga, pihak desa mendapatkan keuntungan atau dampak di sektor ekonomi yang meningkat.

BAB V

TOKOH YANG MEMPUNYAI PERAN PENTING DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA DESA NYATNYONO

A. Peran Pemerintah Desa Nyatnyono

Dalam pengembangan wisata, sebagai usaha dalam meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, diperlukannya pembangunan dan pengembangan dalam sektor pariwisata melalui peran aktif pemerintah desa menjadi instrument yang sangat penting. Terlebih lagi adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 yang memberikan keleluasaan pemerintah desa untuk mengatur segala potensi yang dimiliki, salah satunya desa wisata.

1) Sistem dan Kepengurusan Wisata

Dalam membangun wisata yang baik, tentunya membutuhkan keterlibatan masyarakat, khususnya menyangkut pengelolaan dan perawatan wisata. Oleh sebab itu, dalam menjalankannya pun dibutuhkan sistem dan kepengurusan untuk diberikan tanggung jawab dalam pengelolaan wisata. Dan desa Nyatnyono mempunyai kepengurusan wisata yang dibentuk untuk mengurus wisata makam dan sendang. Yang dalam menentukannya, Kepala Desa Nyatnyono mengatakan:

“Dalam menentukan kepengurusan makam dan sendang, Kami dari pihak Pemerintah Desa biasanya melakukan musyawarah tingkat desa untuk menentukan kepengurusan makam dan sendang yang memiliki periode kepengurusan selama 5 tahun”.
(Wawanacara, Bapak Parsunto, 5 Desember 2022).

Dapat dilihat dari keterangan ini, bahwa pemerintah desa nyatnyono sudah memiliki cara atau mekanisme dalam menentukan kepengurusan wisata berupa musyawarah tingkat desa. Hal ini sejalan dengan konsep desa wisata sebagai sebuah bentuk integrasi satu

kesatuan dan bersatu menjadi kebersamaan dalam tradisi dan aturan yang berlaku.

a. Peran Bumdes Nyatnyono

Bumdes yang memiliki fungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagaimana yang sudah tercantum pada penjelasan Undang- Undang Desa Pasal 87 ayat (1). Di desa Nyatnyono sendiri, Bumdes memiliki sumber potensi ekonomi yang ada melalui warung desa, pengelolaan air bersih, kios makam Mbah Hasan Munadi, Sendang Kalimah Thayyibah, pengelolaan terminal dan Angkutan Wisata yang berada di dekat terminal.

“Dari Bumdes, kami memiliki penyokong melalui warung desa, pengelolaan air bersih, pengelolaan terminal, dan jasa angkutan wisata yang ada di desa nyatnyono”. (Wawancara Pihak Bumdes, Mas Riza, 5 Desember 2022).

Dari wawancara di atas, dapat dilihat bahwa adanya faktor pendukung untuk pengembangan dan kenyamanan wisata di desa nyatnyono. Salah satunya Jasa angkutan wisata dan adanya paguyuban ojek wisata dalam hal mempermudah serta memberikan fasilitas transportasi di wisata yang bisa digunakan oleh para wisatawan dan peziarah khususnya para orang tua yang terbilang masuk kategori lansia. Selain daripada itu, letak jasa angkutan dan ojek wisata itu terletak sangat dekat dengan terminal yang ada di wisata religi nyatnyono. Ini merupakan strategi yang baik dalam memberikan pelayanan bagi para wisatawan dan peziarah. Dan biasanya Bumdes juga berkolaborasi dengan pihak internal lainnya.

“Bumdes berkolaborasi dengan pokdarwis dan pemdes yang PAD sesuai anggaran telah ditentukan”. (Wawancara Pihak Bumdes, Mas Riza, 5 Desember 2022)

b. Peran Karangtaruna

Karangtaruna adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang dibentuk sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan dibidang usaha kesejahteraan sosial. Dan Karangtaruna dalam suatu desa, memiliki peran dalam pembangunan masyarakat, khususnya pada peningkatan potensi dan peran aktif pada generasi muda untuk pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Sedangkan di desa nyatnyono, karangtaruna terlibat aktif dalam kepengurusan wisata yang ada di desa. Selain aktif dan terlibat, karangtaruna juga turut ikut mempromosikan wisata religi yang ada di desa nyatnyono.

“Kami pengurus wisata juga menjadi anggota karangtaruna. Biasanya kami juga ikut mempromosikan wisata yang ada di desa dan membantu para peziarah agar tidak kebingungan dalam berkunjung di wisata desa kami”.(Wawancara, Pengurus Wisata, 4 Desember 2022).

Terlihat dari wawancara di atas, bahwa adanya kontribusi juga dari karangtaruna yang aktif dan terlibat dalam kepengurusan wisata yang ada di desa nyatnyono. Ini merupakan kesadaran yang baik untuk proses pengembangan wisata yang ada di desa nyatnyono dengan didukung oleh karangtaruna yang langsung terlibat dalam kepengurusan wisata

c. Peran Pokdarwis

Pokdarwis merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang berasal dari masyarakat yang tentunya memiliki peran strategis dalam mengembangkan serta mengelola potensi kekayaan alam dan budaya yang dimiliki suatu daerah untuk menjadi daerah tujuan wisata, khususnya wisata yang ada di desa nyatnyono. Di desa nyatnyono, tentunya memiliki Pokdarwis yang fungsi dan perannya sama seperti yang ada di desa lainnya. Namun yang menjadi kendala, di desa nyatnyono Pokdarwisnya tidak aktif atau mengalami kevakuman.

d. Komunikasi dan Keterlibatan Pihak Internal Desa Nyatnyono

Dalam membangun pengembangan wisata di desa nyatnyono, tentunya tidak bisa dilepaskan dengan kerjasama dari segala pihak, yang dimulai dari pihak internal. Pihak internal meliputi Pemerintah desa, Pengurus Wisata, Karang Taruna, Bumdes, Pokdarwis dan beberapa elemen yang terlibat seperti paguyuban yang ada di desa nyatnyono. Dan di desa nyatnyono, pemerintah desa selalu berkolaborasi dipihak internalnya dengan pihak bumdes dan pokdarwis, serta selalu berkomunikasi dengan baik.

“Selama ini komunikasi kami (Pemerintah Desa) dengan Bumdes, karangtaruna dan Pokdarwis selalu baik untuk pengembangan desa wisata di Nyatnyono”. (Wawancara, Pak Parsunto, 5 Desember 2022)

Penjelasan di atas menandakan bahwa perihal komunikasi diantara internal yang terlibat dalam wisata, cukup baik. Meskipun dilain sisi ada elemen di yang tidak aktif dalam kepengurusannya.

“Semua sama tidak ada peran strategis. Namun sayang pokdarwis cenderung mati”. (Wawancara, Bapak Parsunto, 5 Desember 2022).

Dalam menjalankan perannya, semua pihak berjalan dengan baik, seperti yang sudah disampaikan di atas bahwa dalam menjalankan perannya sudah dilaksanakan dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Meskipun dari segala elemen yang terlibat ada elemen atau bagian yang tidak aktif atau mengalami kevakuman seperti yang terjadi pada Pokdarwis.

Dari penjelasan- penjelasan di atas dan hasil observasi berupa wawancara, dapat dikatakan segala pihak memiliki peran dan keterlibatan masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Seperti halnya pihak pemerintah desa yang mencanangkan anggaran untuk pengelolaan dan perawatan wisata serta pengambilan keputusan kepengurusan wisata yang dilakukan secara musyawarah di tingkat desa, Bumdes yang memiliki beberapa penyokong yang sangat membantu untuk pengembangan wisata, seperti jasa angkutan wisata, ojek wisata yang terletak di dekat terminal bus di desa nyatnyono, serta peran karangtaruna dalam keterlibatannya sebagai pengurus wisata di desa dengan tidak lupa mempromosikan wisata kepada para peziarah yang berkunjung, membuat semuanya berjalan secara baik untuk keberlangsungan wisata yang ada di desa nyatnyono meskipun dari salah satu pihak seperti pokdarwis yang mengalami kevakuman.

Dari pernyataan diatas, peneliti ingin mengetahui lebih dalam mengenai pengembangan sektor pariwisata di Desa Nyatnyono dengan pihak yang terlibat. Maka dari itu peneliti melakukan wawancara langsung dengan kepala menuturkan bahwa :

“Kalau ditanya siapa yang berperan dominan itu, tidak ada mas. Saya anggap setara semua”. (Wawancara, Pak Parsunto, 5 Desember 2022)

Dengan demikian, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa dapat perumusan masalah dengan mengenai keterlibatan beberapa pihak dalam menjalankan sektor pariwisata di Desa Nyatnyono adalah setara dan tidak ada pihak yang mendominasi dalam menjalankan sektor pariwisata. Maka dari itu, diharapkan pihak yang terkait baik dari pemerintah desa, bumdes, pokdarwis, serta stakeholder bisa mempunyai kesamaan antara pihak satu dengan lainnya dalam mewujudkan keinginan yang sama untuk membangun sektor potensi pariwisata dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa Nyatnyono itu sendiri.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan tentang “Politik Pariwisata di Tingkat Lokal (Studi Pengembangan Desa Wisata Nyatnyono Ungaran Barat Kabupaten Semarang)” dapat penulis tarik kesimpulan sebagai berikut:

Strategi Kolaborasi Pemerintah Desa Nyatnyono dalam Mengembangkan Potensi Wisata. **Pertama**, Desa Nyatnyono lebih mengacu ke strategi kolaborasi dengan pihak internal dalam pengembangan wisata yang terus didukung oleh Pemerintah Desa dengan anggaran yang sudah direncanakan setiap tahunnya dan melalui beberapa potensi yang dimiliki Bumdes, seperti penyediaan Jasa angkutan wisata, Ojek wisata yang berada di dekat terminal dan adanya pemanfaatan kerjasama di hari-hari besar Islam seperti Bulan Ramadhan, 1 Syawal, Maulidan dan Hari Santri. Kerjasama ini biasa dilakukan oleh Pemdes dengan menggandeng Bumdes dan Pokdarwis. Yang mana pada hari-hari besar ini, Wisata religi di desa nyatnyono ramai dikunjungi oleh wisatawan dan peziarah. **Kedua**, kolaborasi dengan stakeholder luar, hanya dijalin apabila ada pihak luar yang ingin menggandeng atau ingin berkolaborasi dengan wisata religi di nyatnyono. Pihak desa menegaskan kalau pihaknya hanya menerima tawaran kolaborasi atau sponsor dari luar, mengingat desa nyatnyono sudah menjadi desa wisata yang ada di Semarang.

Tokoh yang Mempunyai Peran Penting dalam Mengembangkan Potensi Wisata Desa Nyatnyono. **Pertama**, peran penting dalam mengembangkan potensi wisata berdasarkan konsep kolaboratif, Desa Nyatnyono dengan segala elemen yang ada, seperti Pemdes, Bumdes, Karangtaruna dan Pokdarwis, sudah memaksimalkan peran dan tugasnya

masing-masing, meskipun ada yang belum dimaksimalkan oleh salah satu elemen, yakni Pokdarwis yang mengalami kevakuman atau tidakaktifan. **Kedua**, dalam mengembangkan wisata di desa nyatnyono, semua sama, tidak ada tokoh yang memiliki peran penting atau dominan. Peran dalam pengembangan wisata biasa dilakukan oleh Pemdes, Bumdes dan Pokdarwis. Namun yang disayangkan, justru Pokdarwis cenderung mati atau vakum

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat ditarik saran-saran sebagai berikut yakni, hubungan antara pihak internal desa seperti, pemerintah desa, BUMDES dan pokdarwis dengan pihak eksternal (swasta) lebih ditingkatkan lagi dari sisi hubungan social antar kedua belah pihak. Untuk menciptakan hubungan yang dapat membuat desa wisata Nyatnyono lebih dapat berkembang dalam pengelolaanya. Maka perlu dibentuk peraturan maupun kebijakan yang menguntungkan dua belah pihak sama rata tanpa memberatkan keduanya

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Roikan. “*Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*”. Kota Jakarta: Penerbit Kencana, 2019.
- Adnan, H. . “PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA”. *Jurnal Al’Adl*, Vol.4 2016.
- Alfauziya, Muhamad dan Ahmad Annas Faudi “Relasi Aktor Dalam Perencanaan Pengembangan Potensi Wisata di Desa Karangsalam Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas”, *Jurnal LPPM Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto* Vol.11 No.1 2022.
- Alamsyah, R. M. . “*Pengaruh Kampanye Hitam (Black Campaign) Pada Pemilih Pemula*”, Vol. 9 2015
- AM, K., & M, H. “*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons*”, Hal. 59 2010
- Ansel, C. dan Gash, A. “Collaborative Governance in Theory and Practice” . *Journal of Public Administration Research and Theory*, Hal. 543-571, 2008
- Anwar, F. “*Perubahan dan Permasalahan Media Sosial*,” Hal. 138. 2017
- Aprigiyana, I Komang, Piers Andreas Noak, Muhammad Ali Azhar “Dominasi Kelompok Elite dalam Pengembangan Pariwisata di Desa Tenganan Pegriingsingan”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.1 No.2 2021
- Budiardjo, Miriam. 2008 “*Dasar-Dasar Ilmu Politik* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell , J. W. 2014 “*Penelitian Kualitatif dan Riset*” Yogyakarta : diterbitkan PT Pustaka Pelajar
- Fakih, Mansour. 1999 “*Analisis Gender & Transformasi Sosial*” Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Happy Marpaung, B. “*Pengantar Pariwisata*”. Bandung: Alfabeta. 2002
- Hilman, Y. ” Kelembagaan Kebijakan Pariwisata Di Level Desa”. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Hal. 153 2017

- Kirana, ACintantya Andhita Dara, Rike Anggun Artisa “Pengembangan Desa Wisata Berbasis Collaborative Governance di Kota Batu”, *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, Vol.6 No.1 2020
- Mafaza, Ardhia, Kristina Setyowati “Collabprative Governance Dalam Pengembangan Desa Wisata”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol.11 No.1 2020
- Mustapa, Hasan “Political Regional Tourism in Civil Society Prespective (Profile of Development Strategy of Situ Bagendit Tourism Object, Banyuresmi District, Garut Regency, West Java Province”, *Politicon : Jurnal Ilmu Politik*, Vol.4, No.1 2022.
- Pitaloka, Zhazha “Pengaruh Obyek Wisata Religi Terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Nyatnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang”, Tugas Akhir, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Prasiasa, Dewa Putu Oka “Pengembangan Daerah Wisata dalam Bingkai Politik Pariwisata”, *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia* Vol.3 No.1, 2022.
- Prayogo, Aldwin Flobert “Politik Pariwisata di Jawa Timur : Studi Relasi antar Pemerintah dalam Peningkatan Nilai Pariwisata Pada Taman Nasiona Bromo Tengger Semeru”, Skripsi, Universitas Airlangga, 2019
- Sakti, Luxy Pujo “Logika Elite Desa dalam Praktik Pembangunan Desa Wisat Pujon Kidul”, *Jurnal Pariwisata*, Vol.8 No.1 2021
- Sartika, Mila, Hendri Hermawan Adinugraha, Hayu Wikan Kinasih “Kearifan Lokal di Pedesaan : Kajian Praktik Budaya Religi di Desa Nyatnyono”, *International Journal Ihya"Ulum Al-Din*, Vol.20, No.1 2018.
- Schroder, Peter. 2013 “*Strategi Politik*” Jakarta: Friedrich Nauman Stiftung Fur die Freiheit, Indonesia..
- Soenarjanto, Bagoes, Tri Yuliyanti, Arif Darmawan “ Pengembangan Desa Wisata Gununganyar Kecamatan Soko Kabupaten Tuban Dalam

- Perspektif Collaborative Governance”, *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, Vol.2 No.1 2022
- Sugiyono. 2010 “*Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ” Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2012 “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* ” Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Trius, Jujun “Inovasi Pembangunan Desa dalam Perspektif Politik Pembangunan (Studi Pada Desa Wisata Ulak Pandan Merapi Barat Kabupaten Lahat Sumsel”, Skripsi, 2021.
- Widyastuti, N. "Kajian atraksi, Amenitas dan Aksesibilitas untuk Pengembangan Pariwisata Umbul Ponggok di Kabupaten Klaten”. *Universitas Gajah Mada*, 2018
- Wijaya, I. N. “RELASI-RELASI KEKUASAAN DI BALIK PENGELOLAAN INDUSTRI PARIWISATA BALI” . *Jurnal Humaniora*, 2012

LAMPIRAN

Gambar Wawancara Bersama Kepala Desa Nyatnyono





Wawancara bersama Ketua Pokdarwis Desa Nyatnyono



Wawancara bersama masyarakat setempat Desa Nyatnyono



Wawancara dengan Sekretaris Desa Nyatnyono



Wawancara dengan Ketua BUMDES Desa Nyatnyono

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhammad Irvan Nurcahyo
TTL : Semarang, 4 Februari 2000
Alamat : Tembalang Pesona Asri M/11 RT.04/RW.04 Kramas Tembalang
Kota Semarang
NIM : 1806016048
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP)
IPK : 3,53
Agama : Islam
Email : mirvanur4@gmail.com
No. HP : 081910705894

Riwayat Pendidikan :

SMA Islam Hidayatullah – IPS

Riwayat Organisasi :

1. Himpunan Mahasiswa Islam
2. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
3. Centre for Democracy and Islamic Studies (CDIS)

Pengalaman Magang dan Volunteer

1. Magang di Kantor KPU Kota Semarang